



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN KINERJA INTSTANSI PEMERINTAH

2022



SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

KATA PENGANTAR



BPJN
JAYAPURA

@pupr-jalan-jayapura
<https://binamarga.pu.go.id/balai-jayapura>
Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepantai, Abepura-Jayapura

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022** dapat disusun.

Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk pertanggungjawaban Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui laporan ini, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura kedepannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga LKIP Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 ini dapat tersusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jayapura, Januari 2023

**KEPALA SATUAN KERJA
BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL JAYAPURA**



Benyamin Elieser Pasurnay, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197011091993031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Dalam lingkup Satuan Kerja, penjabaran tugas tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka **terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program** Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Adapun **SASARAN STRATEGIS** terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN NASIONAL

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,09 Jam/100 Km pada tahun 2022.

Dan **SASARAN PROGRAM** sebagai berikut :

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL

Dalam mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program, untuk Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang berada di bawah wewenang BPJN Jayapura berkontribusi melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut :

– Rating Kondisi Jalan Nasional

Baseline 2021 : 2,89

Target 2022 : 2,76

Capaian 2022 : 2,76, Kemantapan : 85% (Sumber : data hasil running IRMS V.03)

- Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan agregasi dari kinerja masing-masing unit kerja yang berada di bawahnya;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022;
- Realisasi tingkat capaian masing-masing output di Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai berikut:
 1. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengendalian dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 0,94 Layanan dengan kualitas kinerja **94,00%**;
 2. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Umum dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 0,89 Layanan dengan kualitas kinerja **89,00%**;
 3. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Perkantoran dari 1 Layanan yang direncanakan terealisasi 0,99 Layanan dengan kualitas kinerja sebesar **99,00 %**.
 4. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Jumlah Layanan Sarana Internal sebesar **100%** dari 1 Layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
- **Rata-rata Capaian Kinerja untuk seluruh output** yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di **Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2022** adalah sebesar **95,50%** dan termasuk dalam kategori **capaian kinerja Sangat Memuaskan**;

- Ditinjau dari aspek keuangan, DIPA Tahun Anggaran 2022 di Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berdasarkan Revisi PK yang dilakukan bulan November 2022 adalah sebesar Rp. 39.885.729.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2022 DIPA Revisi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura adalah sebesar Rp. 39.885.729.000,-. **Realisasi keuangan secara total Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 37.575.259.000,- atau 94,21%** terhadap DIPA revisi akhir tahun 2022;
- Besar **realisasi anggaran** Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura yang berasal dari **Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional adalah sebesar Rp. 10.661.447.000,- atau 88,76%** terhadap Anggaran Revisi, sedangkan **realisasi anggaran yang berasal dari Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar Rp. 26.913.812.000,- atau 96,55%** terhadap Anggaran Revisi;
- Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut :
 - a. Adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini;
 - b. Faktor SDM Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai.
 - c. Peralihan system keuangan dari SAS (Sistem Aplikasi Satker) ke SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
- Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
 - b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom;
 - c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki tahun 2022 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;
 - d. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana

fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;

- e. Proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan SAKIP dimasa mendatang.
-
- Penyusunan dan pelaporan kinerja di lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura pada tahun 2022 telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan karena keseluruhan elemen SAKIP sudah dapat diterapkan. Penerapan SAKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya berbasis kinerja di lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura guna mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	9
1.4 Isu Strategis.....	10
1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua	12
1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua	17
1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2020	18
1.5 Sistematika Penyusunan LKIP.....	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan Lainnya	20
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR.....	20
2.1.2 Tujuan Kementerian PUPR.....	21
2.1.3 Sasaran Kementerian PUPR.....	21
2.1.4 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024	22
2.1.5 Tujuan dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024	27
2.1.6 Tujuan dan Sasaran Satker BPJN Jayapura 2020-2024	33
2.2 Perjanjian Kinerja (PK)	34
2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2021	34
2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2022	35
2.3 Metode Pengukuran.....	37
2.4 Target Tahun ini Menurut Dokumen Perencanaan	41

BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	43
3.1 Sumber Daya Manusia.....	43
3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	43
3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	44
3.1.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian	45
3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik	47
3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia.....	48
3.1.7 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kelompok Jabatan	49
3.2 Sarana dan Prasarana	51
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	59
3.3.1 Perubahan Anggaran.....	59
 BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	 61
4.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	62
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi	70
4.3 Realisasi Anggaran.....	74
4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	75
4.3.2 Analisis Penyerapan Anggaran	77
4.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2021	81
 BAB V. PENUTUP	 83
5.1 Permasalahan.....	83
5.2 Rekomendasi.....	84
 LAMPIRAN	
• Lampiran I Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2022 (Awal);	
• Lampiran II Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2022 (Revisi);	
• Lampiran IV Data Kaki LKIP TA. 2022;	
• Lampiran V Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2022	

DAFTAR TABEL

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	20
Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Program 2020-2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	28
Tabel II.2 Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk Provinsi Papua.....	29
Tabel II.3 Target Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024.....	31
Tabel II.4 Kebutuhan Pendanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024.....	32
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 (Awal) Satuan Kerja BPJN Jayapura	34
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 (Revisi) Satuan Kerja BPJN Jayapura	35
Tabel II. 7 Sandingan PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2022.....	36
Tabel II. 8 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program	38
Tabel II. 9 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/Output Fisik	40
Tabel II.10 Sandingan Target Perjanjian dengan Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura di Tahun 2022	41
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI.....	43
Tabel III.1 Komposisi Pegawai di lingkungan Satker BPJN Jayapura.....	49
Tabel III. 2 Rekapitulasi Jenis Sarana dan Prasarana pada Satuan Kerja BPJN Jayapura	52
Tabel III. 3 Laporan Kondisi Barang pada Satuan Kerja BPJN Jayapura.....	52
Tabel III. 4 Kronologis Revisi DIPA pada Satker BPJN Jayapura T.A. 2021	59

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	61
Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian	62
Tabel IV.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BPJN Jayapura TA. 2021	64
Tabel IV.3 Capaian Kinerja Output Pendukung Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Satker BPJN Jayapura Tahun 2022.....	65
Tabel IV.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi) Tahun 2020-2022	71
Tabel IV.5 Perbandingan Target Dokumen Perencanaan Lainnya dengan Realisasi Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun 2022.....	73
Tabel IV.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022.....	74
Tabel IV.7 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Satker BPJN Jayapura.....	77
Tabel IV.8 Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022 Satker BPJN Jayapura.....	77
Tabel IV.9 Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut.....	78

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.....	9
Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua.....	10
Gambar 1.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke	11
Gambar 1.4 Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua.....	14
Gambar 1.5 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara Provinsi Papua dan Papua Barat	15
Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua	15
Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua	16
Gambar 1.8 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	20
Gambar 2.1 Peta Strategi (<i>Strategy Map</i>) Kementerian PUPR 2020-2024	22
Gambar 2.2 Peta Strategi (<i>Strategy Map</i>) Ditjen Bina Marga 2020-2024.....	24
Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1).....	25
Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (2).....	26
Gambar 2.5 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	37
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI.....	43
Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	43
Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian	45
Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46

Gambar 3.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik	47
Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia.....	48
Gambar 3.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	49
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	61
Gambar 4.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja	62
Gambar 4.2. Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Progres Fisik dan Keuangan di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2020-2022	76
Gambar 4.3. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga wajib untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Kerja BPJN Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 masing-masing menurut tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari :

1. Kepala Satker
 - a. Tugas :
 - 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net;
 - 3) Menetapkan pejabat pengadaan;
 - 4) Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
 - 6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA;
 - 7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

- 9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
 - 10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I;
 - 11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk Pelaksanaan apabila diperlukan;
 - 12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - 13) Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - 14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan;
 - 15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsung;
 - 16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM;
 - 17) Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
 - 18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
 - 2) Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker yang membebani APBN;
 - 3) Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
 - 4) Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
 - 5) Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satker;
 - 6) Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan Langsung/Penanggung jawab Program.
2. Pejabat Pembuat Komitmen
 - a. Tugas :
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencan Kontrak;
 - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - 3) Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja;
 - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - 10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan;
 - 11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan;
 - 12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
 - 13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia Barang/ Jasa;
 - 15) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker;
 - 16) Menyerahkan aset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
 - 17) Menandatangani pakta integritas;
 - 18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
 - 19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas);
 - 20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa untuk kegiatan yag tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
 - 21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita acara Pemeriksaan Barang;

- 22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
 - 23) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
 - 24) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
 - 25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker;
 - 26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Thunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;
 - 2) Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA;
 - 3) Bertanggung jawab kepada Kasatker.
3. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
- a. Tugas :
- 1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja;
 - 2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
 - 3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - 5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank);
 - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa).
 - 6) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- 7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-sekurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan :
 - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar;
 - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Paerintah Pembayaran;
 - c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akutansi/Verifikasi Keuangan;
 - d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen;
 - e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - 8) Menyampaikan SPM yangtelah ditandatangani ke KPPN setempat;
 - 9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaiakannya kepada Kepala Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan, dan tujuan pengeluaran;
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
4. Bendahara Pengeluaran
- a. Tugas :
- 1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran;
 - 2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, dan SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya;
 - 3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaiakannya kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
 - 4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara;
 - 5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara;
 - 6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
 - 7) Melakukan pembayaran melalui Uang persediaan atas persetujuan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja untuk Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perizinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan

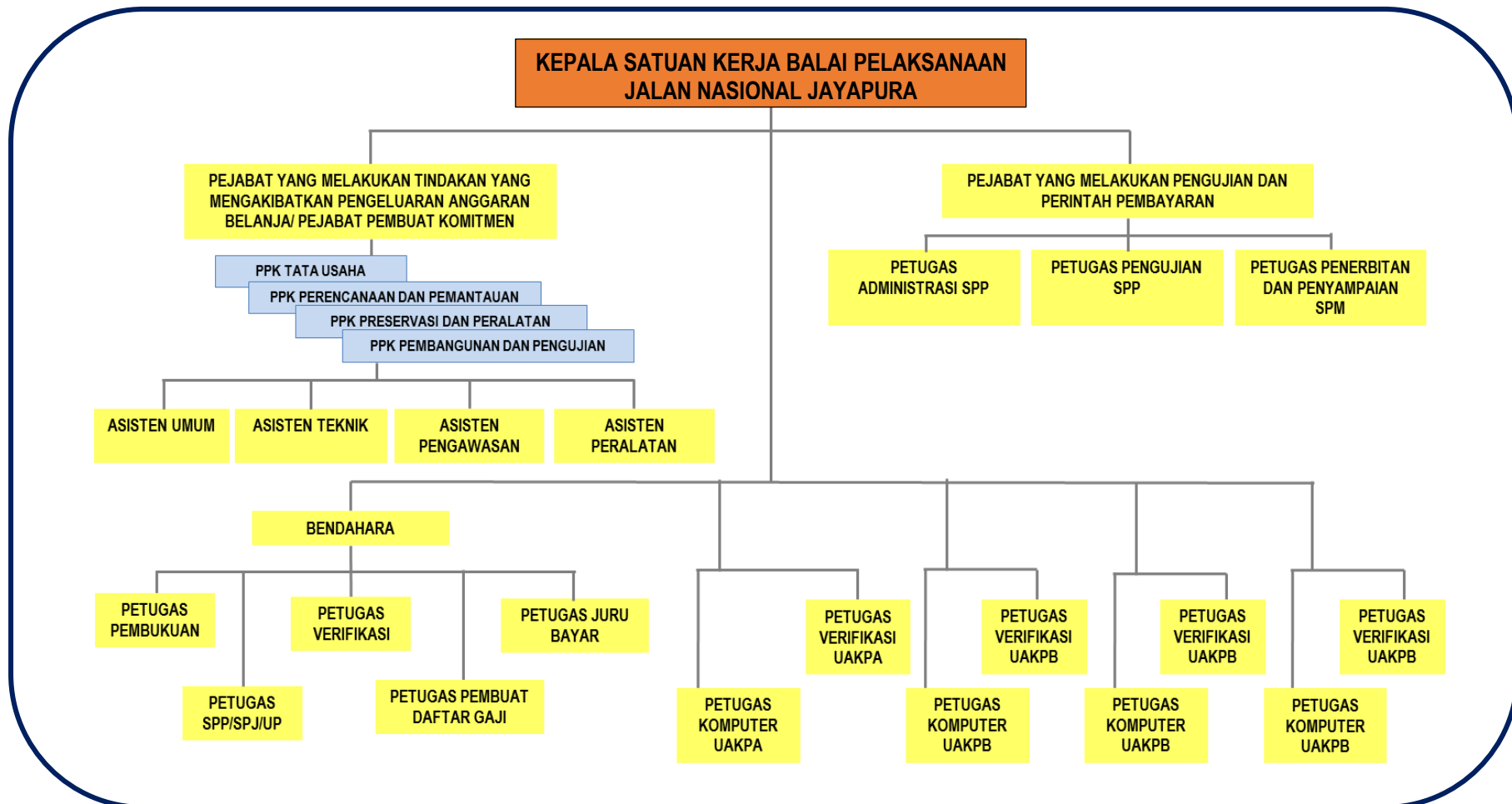
dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas;

- 8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan pembayar tidak terpenuhi;
 - 9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait;
 - 10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan;
 - 11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada :
 - KPPN setempat;
 - BPK RI;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas pengeolaan uang persediaan;
 - 2) Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;
 - 3) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
5. Penanggung jawab Unit Akuntansi Satuan Kerja
1. *Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)*
 - a. Tugas :
 - 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait;
 - 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.
 - b. Tanggung jawab :
 - 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja.
 2. *Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)*
 - a. Tugas :

- 1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
 - 3) Menyampaikan Laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 (UAPPB-E1) beserta Arsip Data Komputernya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang /Kepala Satuan Kerja
3. *Petugas E-monitoring*
- a. Tugas :
- 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
 - a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
 - b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan).
 - d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja.
 - e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-monitoring online.
 - 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-monitoring offline
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara periodic sesuai ketentuan.
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai ketentuan.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan kegiatan (backup data maupun cetakan);
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 dapat dilihat pada **Gambar 1.1** :

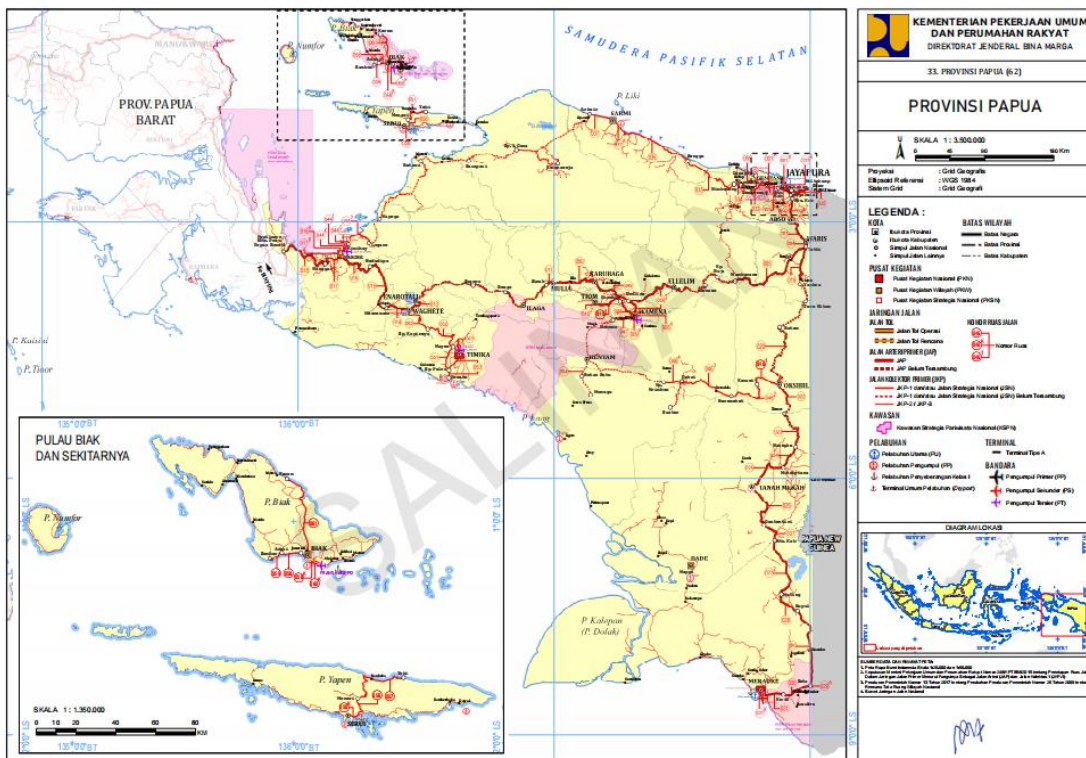


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura

1.4. Isu Strategis

Provinsi Papua memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan berada di ujung timur wilayah Indonesia. Luas Provinsi Papua (termasuk pulau-pulau di sekitarnya) sebesar ± 319.036,05 km² (Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2021), dengan jumlah penduduk ±4,3 juta jiwa dan terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara geografis dan topografi, pada bagian tengah dan sebagian pantai utara merupakan pegunungan yang tinggi, sedangkan bagian pantai selatan didominasi dengan dataran luas.

Seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka kuantitas, harga dan waktu menjadi pertimbangan yang penting. Peran infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi dalam pemerataan distribusi barang maupun jasa kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau terutama dalam jumlah yang besar, murah dan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Bagi masyarakat Papua pada umumnya, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, terutama sarana transportasi darat, disebabkan oleh wilayahnya yang luas dan dengan penyebaran penduduk yang tersebar. Rasio panjang jalan yang ada dibanding luas wilayahnya menjadikan Papua menempati posisi terendah dibanding dengan daerah lain, terkait dengan indeks aksesibilitas transportasi darat. Pada kondisi ini, BPJN Jayapura mengambil peranan yang sangat penting dalam melaksanakan dan mengendalikan infrastruktur jalan dan juga sebagai pembina bagi infrastruktur jalan di tingkat provinsi dan kabupaten.

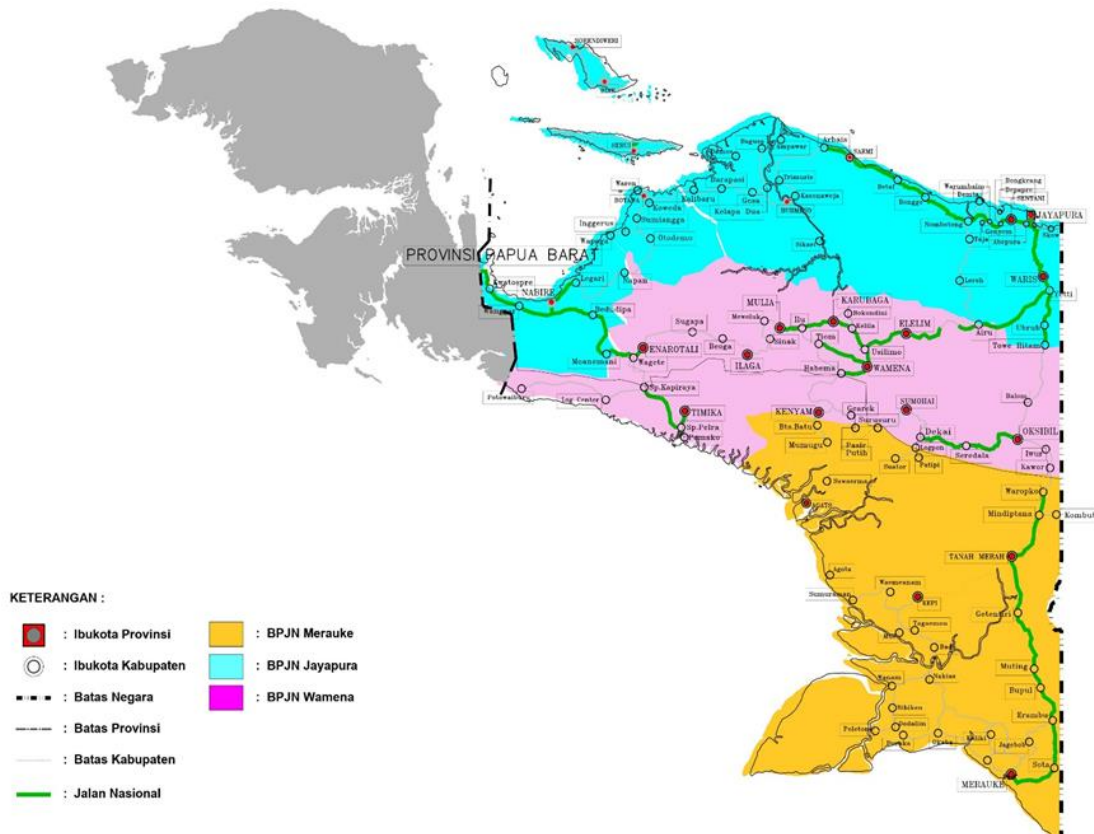


Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ruas jalan nasional

di Provinsi Papua tercatat sepanjang 2.778,38 Km dan terdiri dari 102 ruas yang ditangani oleh 3 (tiga) Balai yaitu BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 Juni 2020, terjadi pemekaran pada BBPJN XVIII Jayapura dengan lahirnya BPJN Jayapura dan BPJN Wamena. Dari total panjang ruas jalan nasional Provinsi Papua tersebut, sebanyak 58 ruas dengan total sepanjang 1.293,023 Km (sesuai SK Jalan pada tanggal 28 April 2022) ditangani oleh BPJN Jayapura.

Dibawah ini merupakan peta ilustrasi pembagian wilayah penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena, dan BPJN Merauke di Provinsi Papua :



Gambar 1.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke

Adapun total penanganan panjang jalan dan jembatan secara keseluruhan yang berada di bawah kewenangan BPJN Jayapura tercatat sepanjang 1.445,983 Km yang terdiri dari :

RUAS JALAN PENANGANAN BPJN JAYAPURA		
Jalan Nasional	: 1.293,023	1.293,023
Trans Papua	: 532,24	
Terdapat Jalan Nasional	: 453,98	
Sisa panjang (Non Nasional)	: 78,26	78,26
Jalan Perbatasan	: 260,06	
Terdapat Jalan Nasional	: 185,36	
Sisa panjang (Non Nasional)	: 74,7	74,7
TOTAL PANJANG		1445,983

Tantangan pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan pola penduduk yang menyebar di sebagian besar wilayah khususnya kawasan pegunungan, hal ini menyebabkan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Secara umum kondisi topografi di Provinsi Papua relatif bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa disekitar pantai, dan rangkaian pegunungan membentang dibagian tengahnya sepanjang sekitar 650 Km, dengan puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl.

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat terendah secara nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang selalu mengemuka, hampir disetiap momen-momen pembahasan atau diskusi tentang pembangunan Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah terutama pada kabupaten-kabupaten, masih sangat banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara untuk angkutan orang dan barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri kapasitas yang sangat terbatas dan umumnya tidak terjadwal serta sangat tergantung pada kondisi cuaca dengan biaya transportasi yang sangat mahal.

Kondisi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan darat yang memadai ini, memunculkan permasalahan di berbagai sektor pembangunan, utamanya pada aspek perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Permasalahan sosial, menyangkut rasa ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh para tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua.

1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan Tata Ruang Provinsi Papua

Isu strategis ini sejalan dengan salah satu konsep dasar pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dimana pengembangan infrastruktur diharapkan sesuai dengan peran dan fungsi sistem kota-kota yang saling menghubungkan pusat dengan pusat, pusat dengan sub pusat, serta sub pusat dengan perkampungan yang bertujuan mempermudah pergerakan barang/ jasa/ manusia, serta jalur distribusi dan pemasaran sehingga pada akhirnya dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan berpotensi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Kegiatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang dilakukan oleh BPJN Jayapura juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu strategis pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan tata ruang sekaligus mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Papua yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai berikut :

Sistem Perkotaan Nasional

- Pusat Kegiatan Nasional atau PKN

Jayapura (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional)

- Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW
 - **Biak** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - **Nabire** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - **Sarmi** (Tahapan Pengembangan: pengembangan baru Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - **Arso** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional).
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN
 - **Jayapura** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan);
 - **Biak** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan).

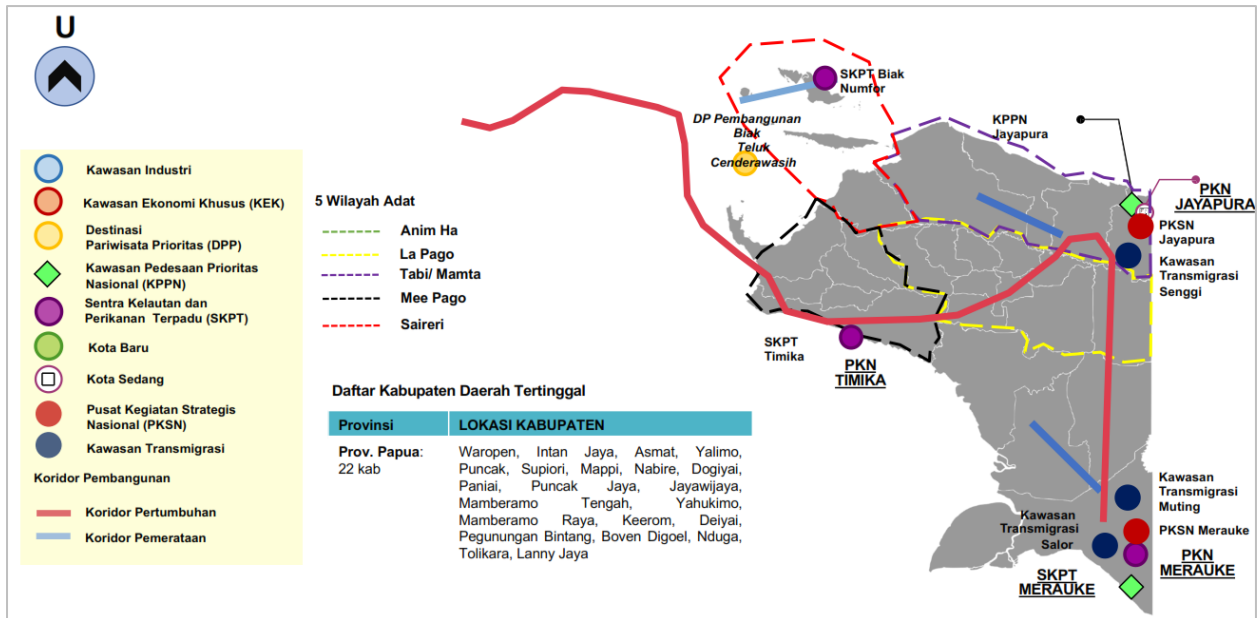
Kawasan Andalan (sektor unggulan yang prospektif dikembangkan)

- **Kawasan Biak** (pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan);
- **Kawasan Nabire dan sekitarnya - Aran, Moswaren, dan Legare** (pertanian, perkebunan, pertambangan);
- **Kawasan Mamberamo – Lereh (Jayapura) dan sekitarnya** (industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, pariwisata);
- **Kawasan Andalan Laut Teluk Cenderwasih-Biak dan sekitarnya** (perikanan, pertambangan, pariwisata, minyak dan gas bumi)
- **Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi** (perikanan, pariwisata).

Kawasan Strategis Nasional

- **Kawasan Biak** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi)

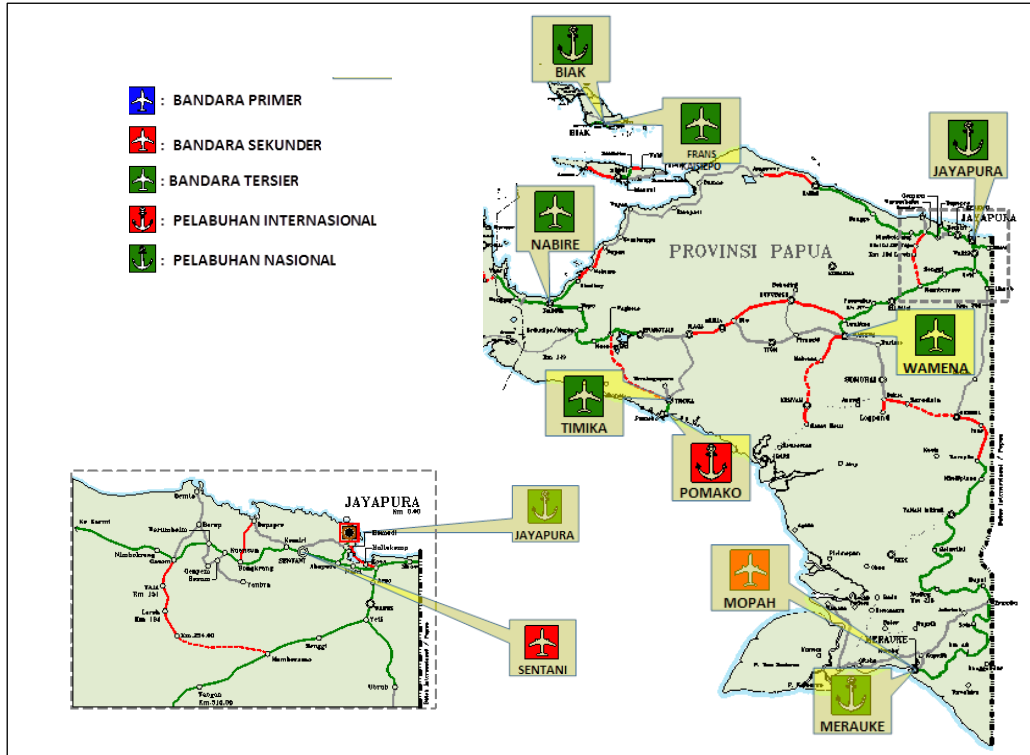
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan)



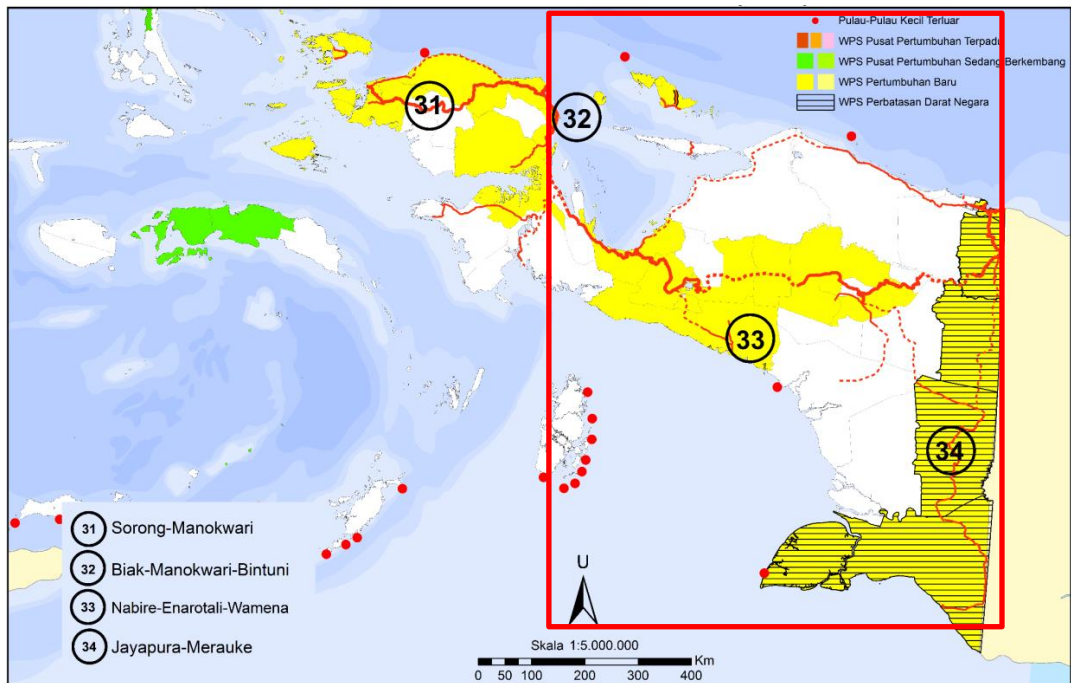
Gambar 1.4 Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua
 Sumber : Paparan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Bappeda Provinsi Papua, 2021

2. Kesesuaian dengan Konsep Pembangunan melalui Pendekatan Kewilayahan

Konsep ini menekankan pembangunan yang dilakukan secara terpadu di wilayah-wilayah yang teridentifikasi memiliki peluang untuk dikembangkan berdasarkan sektor unggulan yang terdapat di wilayah tersebut . Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki arah dan sasaran yang jelas dan secara efektif dan efisien mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Provinsi Papua memiliki banyak potensi unggulan di masing-masing wilayah adat yang meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan, serta keberadaan simpul-simpul transportasi yang bisa dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur sehingga satu sama lain saling terkoneksi yang pada akhirnya dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa dan mengurangi kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini jalan dan jembatan yang dilakukan BPJN Jayapura diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga



Gambar 1.5 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara Provinsi Papua dan Papua Barat



Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua

Pemerintah Pusat, melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, telah menerapkan 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di yang ada di Provinsi Papua, yaitu :

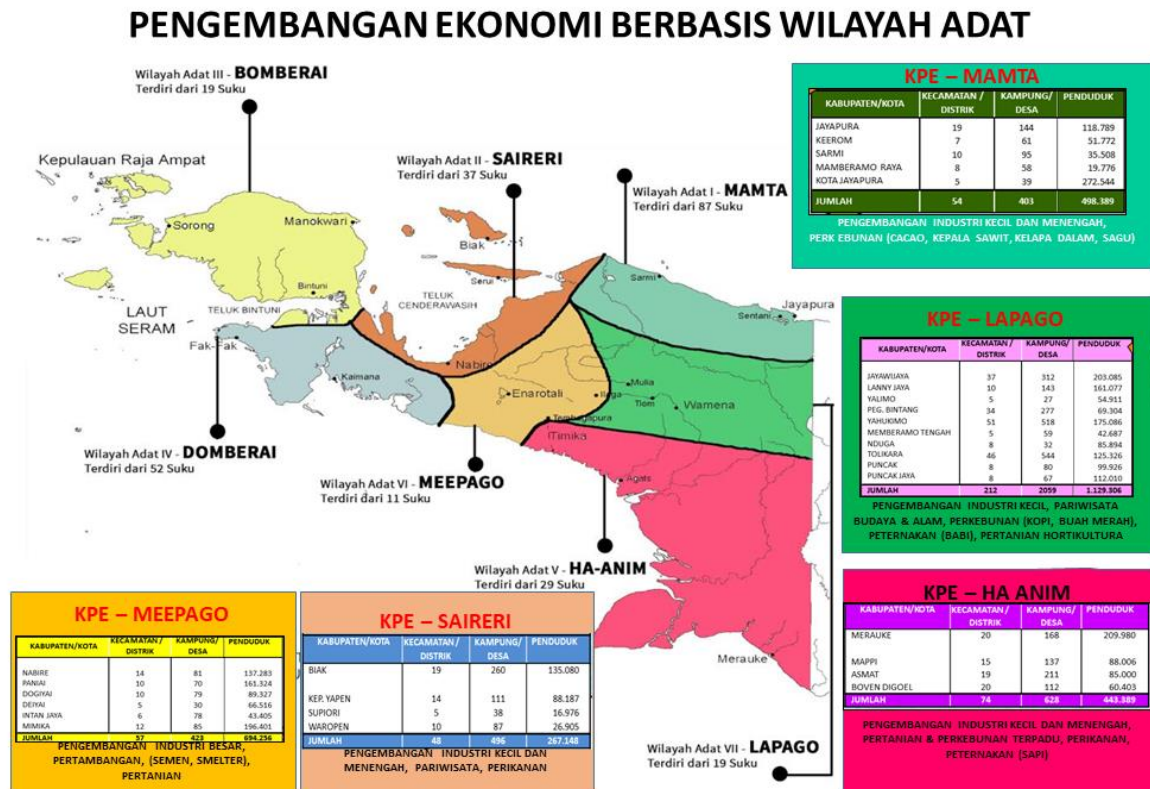
1. WPS 32 : Biak - Manokwari - Bintuni;
2. WPS 33 : Nabire - Enarotali - Wamena;
3. WPS 34 : Jayapura - Merauke.

Ilustrasi Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) bisa dilihat pada Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua seperti tampak pada **Gambar 1.6** di atas.

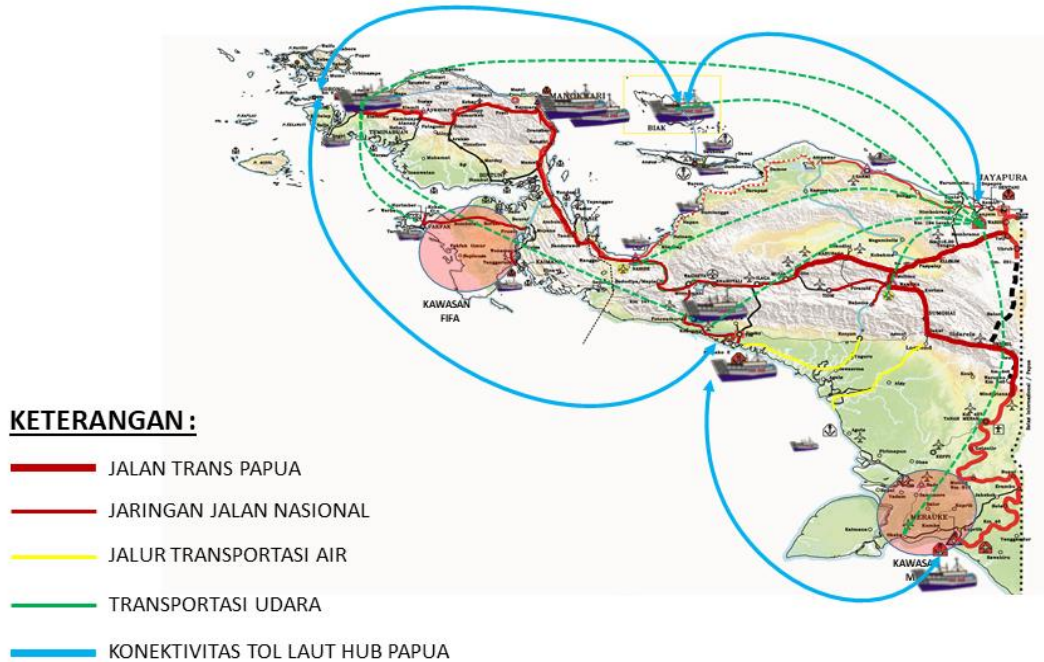
Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kegiatan pembangunannya juga memiliki konsep pembangunan berbasis kewilayahan, dengan membagi wilayahnya menjadi 5 (lima) wilayah Adat, yaitu :

1. Wilayah Adat Mamta;
2. Wilayah Adat Saereri;
3. Wilayah Adat Anim Ha;
4. Wilayah Adat La Pago; dan
5. Wilayah Adat Mepago.

Konsep pembangunan berbasis kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian wilayah dengan cara menonjolkan komoditi lokal yang dimiliki wilayah tersebut. Ilustrasi Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua bisa dilihat pada Peta Wilayah Adat Provinsi Papua seperti tampak pada **Gambar 1.7**.



Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua



Gambar 1.8 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua

1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Papua dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merencanakan Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua dan Ruas Jalan Perbatasan yang merupakan program strategis penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan diharapkan menjadi solusi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai di Provinsi Papua dengan penjelasan sbb :

1. Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua

Ruas Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang \pm 532,24 Km dan terbagi dalam 3 segmen penanganan. Pembangunan Trans Papua diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dengan menyambung pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat – pusat produksi rakyat yang pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua. Sepanjang 532,24 Km merupakan panjang penanganan yang menjadi wewenang BPJN Jayapura, yang meliputi :

1. Ruas Bts. Prov. Papua/Papua Barat - Nabire (Bts. Kota Nabire) sepanjang 146 Km;
2. Ruas Nabire-Wagete-Enarotali sepanjang 193,43 Km;
3. Ruas Wamena-Elelim-Jayapura (Yetti) sepanjang 192,81 Km;

2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan

Ruas Jalan Perbatasan RI-PNG yang ditangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura terdiri dari 2 segmen penanganan dengan total sepanjang 260,06 Km, antara lain: Jayapura-Waris-Yetti sepanjang 127,62 Km; Yeti-Ubrub-Towe-Hitam-Oksibil sepanjang 132,44 Km;

1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2022

Beberapa kondisi dan situasi menjadi tantangan bagi Satuan Kerja BPJN Jayapura dalam upaya mewujudkan seluruh sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kondisi dan situasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut beberapa diantaranya memiliki sifat spesifik yang tidak/jarang dijumpai pada wilayah lain di luar Provinsi Papua. Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya melaksanakan kegiatan di Tahun 2022, antara lain :

a. Pandemi COVID-19

Sejak triwulan pertama tahun 2020 muncul pandemi COVID-19 yang membawa dampak adanya pembatasan mobilitas dan jam kerja/aktivitas serta aturan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Hal ini berakibat pada tertundanya penyelesaian pekerjaan di lapangan dikarenakan mobilitas manusia dibatasi begitu juga dengan transportasi darat, laut, dan udara yang dibatasi jam operasionalnya.

b. Aspek Keamanan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Papua belum terbebas dari kelompok bersenjata yang berseberangan dengan Pemerintah. Pada beberapa daerah kondisi keamanan karena gangguan-gangguan dari kelompok tersebut masih terjadi dan berdampak pada lambatnya kegiatan pembangunan. Pada sisi lain, situasi keamanan yang kurang kondusif ini menyebabkan biaya proyek menjadi cukup mahal mengingat faktor resiko yang harus diperhitungkan oleh Penyedia Jasa;

c. Aspek Lingkungan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah – Provinsi (RTRW-P), Provinsi Papua didominasi dengan kawasan hutan yang mencapai 80% dari luas kawasan yang ada. Banyak diantara kawasan hutan ini yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi, Taman Nasional dan Hutan Lindung yang menjadi hambatan khusus dalam pembangunan jalan. Upaya penyelesaian penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Dokumen Kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perjanjian Kerja Sama menjadi tantangan tersendiri agar kegiatan-kegiatan penanganan jalan aman secara lingkungan dan tidak bersinggungan dengan masalah hukum.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Ada kesulitan yang dirasakan dalam upaya menyediakan tenaga profesional dan terlatih. Sumber daya manusia profesional yang tersedia (lokal) sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Upaya untuk mendatangkan tenaga profesional dari provinsi lain juga relatif sulit karena ketiadaan stimulus bagi tenaga kerja tersebut. Hal ini berdampak pada hasil produktivitas pekerjaan di lapangan dan di kantor;

Untuk merangkum semua hal yang terjadi selama 1 tahun anggaran dan dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan, Satuan Kerja BPJN Jayapura bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja BPJN Jayapura Tahun 2022. LKIP Satuan Kerja BPJN Jayapura ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pemanfaatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Dokumen ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Satuan Kerja BPJN Jayapura di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penyusunan LKIP

1. **RINGKASAN EKSEKUTIF**, bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
2. **BAB I. PENDAHULUAN**, bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu strategis dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
3. **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**, bab ini berisi tentang uraian singkat Renstra, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
4. **BAB III. KAPASITAS ORGANISASI**, bab ini berisi tentang informasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta DIPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
5. **BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA**, bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi, perbandingan kinerja organisasi, realisasi anggaran, Paket Strategis (PN, SBSN dan PSN), serta informasi paket yang diresmikan dan penghargaan yang berhasil diraih Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
6. **BAB V. PENUTUP**, bab ini menyajikan rangkuman permasalahan serta rekomendasi yang berupa tindak lanjut dan harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari LKIP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
7. **LAMPIRAN**, bagian ini terdiri dari :
 - **Lampiran I** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2022 (Awal);
 - **Lampiran II** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2022 (Revisi);
 - **Lampiran III** Pengukuran Kinerja TA. 2022;
 - **Lampiran IV** Data Kaki LKIP TA. 2022;
 - **Lampiran V** Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2022 (Kondisi 0%, 50%, 100%).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) atau Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target *outcome* dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) atau dalam hal ini Dokumen Perencanaan Satker. Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura 2020-2024 merupakan penjabaran Renstra entitas di atasnya yaitu Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020 – 2024.

2.1 Uraian Singkat Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR

Visi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

VISI (Kementerian PUPR)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
"INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI (Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2 Tujuan Kementerian PUPR

Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

2.1.3 Sasaran Kementerian PUPR

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi

penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (*strategy map*) sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.1.**



Gambar 2.1 Peta Strategi (*Strategy Map*) Kementerian PUPR 2020-2024
 Sumber: Renstra Kementerian PUPR

Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Unit Organisasi.

2.1.4 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024

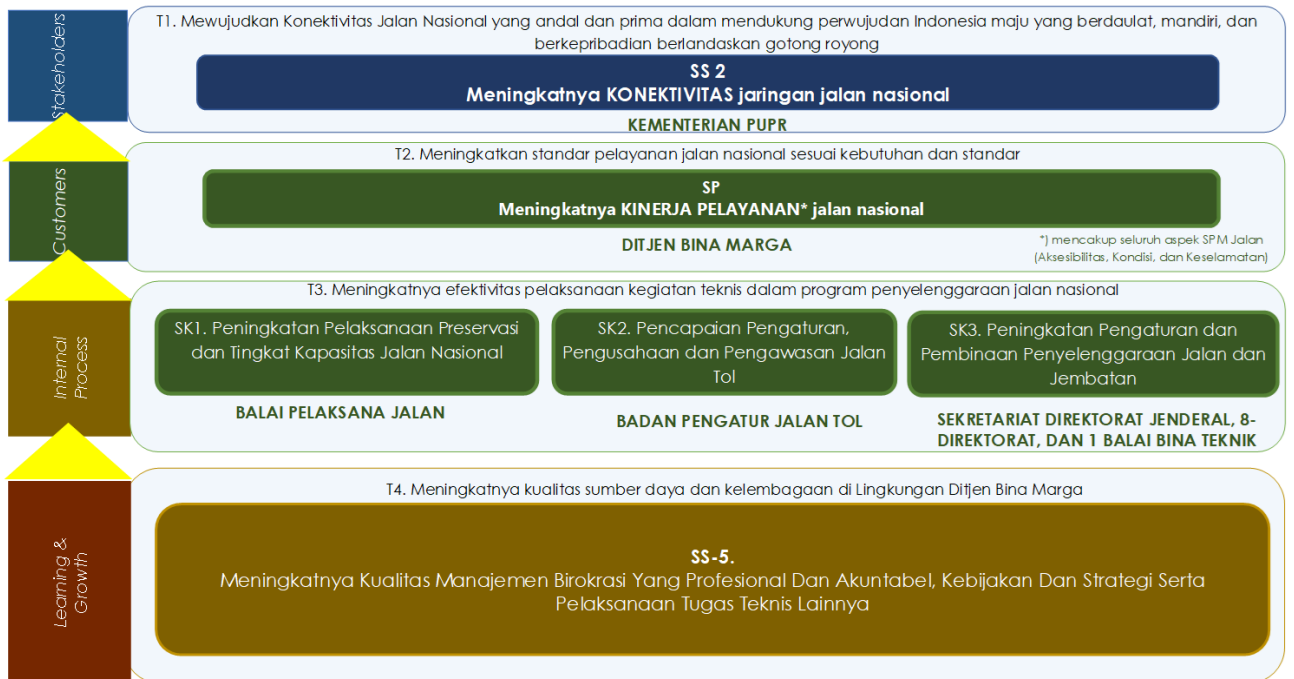
Tujuan dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 (Sub Bab 2.1). Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut :

TUJUAN (Ditjen Bina Marga)

- T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
- T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
- T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;
- T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

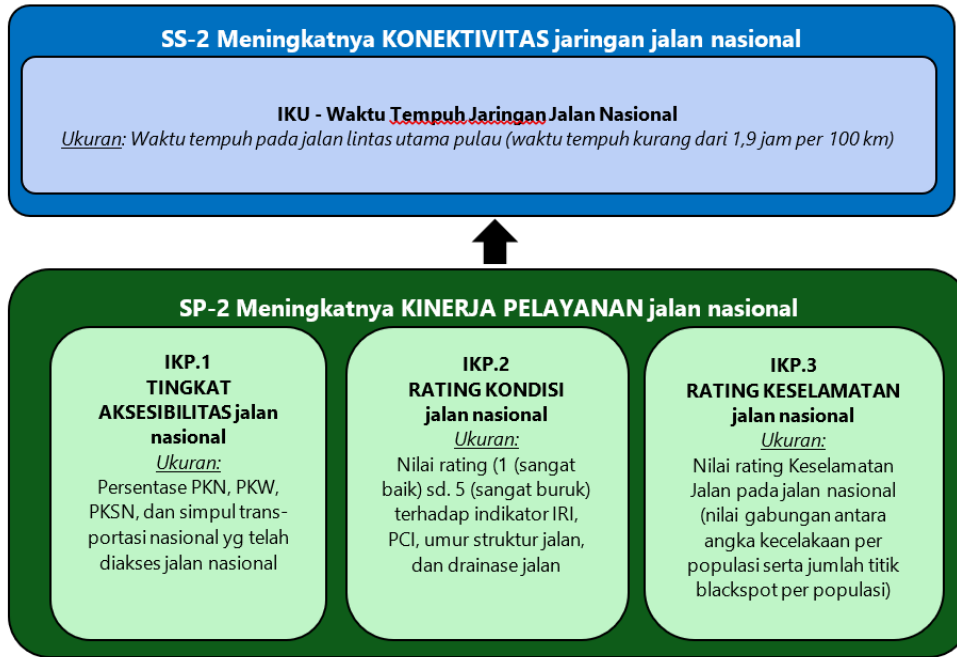
Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari 3 jenis sasaran yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat **Gambar 2.2**, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Stakeholders Perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih c.q Menteri PUPR c.q Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni sasaran dari program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Customer Perspectives* yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program penyelenggaraan jalan) yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional.
3. Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat maupun Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Internal Business Process Perspectives* (IBPP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:
 - Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.) UU 38/2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena kegiatan ini terkait proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Internal Business Process Perspectives*;
 - Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Learning and Growth Perspectives*.



Gambar 2.2 Peta Strategi (Strategy Map) Ditjen Bina Marga 2020-2024

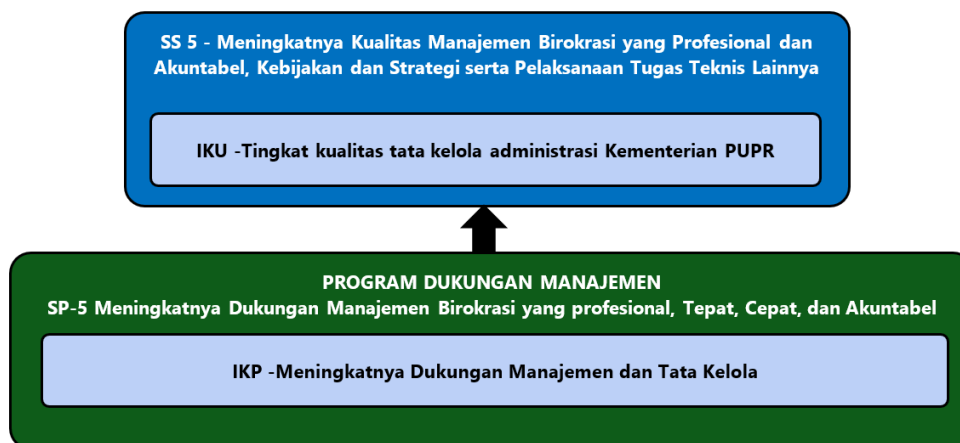
Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024



Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1)

Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Pada Renstra PUPR 2020-2024 terdapat program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari: pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)), fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum (berupa jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan pada periode 2020-2024), pengelolaan barang milik negara (jumlah provinsi yang diberikan layanan BMN), dan pelayanan kepegawaian DJBM (jumlah orang yang diberikan layanan publik baik PNS maupun Non PNS). Untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan.



Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (2)

Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga akan menjadi SK dan IKK pada level Unit Eselon II dan Balai Terkait. Penjelasan tentang IKU dan IKP pada gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Harapan publik utamanya terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan diukur dari terhubungnya simpul transportasi dan pusat kegiatan nasional (berdasarkan Sistranas, RTRWN), arahan RPJMN, termasuk kawasan dan lokus prioritas nasional oleh jaringan jalan nasional (sesuai definisi jalan nasional dalam pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan). Waktu tempuh pada koridor lintas utama terpilih ditargetkan 1,9 jam per 100 km.
2. Sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) diatas. Oleh karenanya, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional, yakni:
 - a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan skala nasional (PKN, PKW, PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan/ Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A), dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol);

- b. Rating kondisi jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (*IRI/International Roughness Index*). Selanjutnya secara teknis indikator IRI (beserta indikator lainnya: *Pavement Condition Index (PCI)* dan umur struktur jalan, kondisi drainase, dll) digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metode Rating Kondisi Jalan (RKJ): dimana Skor 1 (sangat baik atau baru) dan Skor 5 (rusak berat).
- c. Tingkat keselamatan jalan nasional, mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*Black Spot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor berskala 1 sampai 5: dimana Skor 1 (risiko kecelakaan pada level sangat rendah) dan Skor 5 (risiko kecelakaan pada level sangat tinggi) yang menggabungkan antara dua indikator yaitu Tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dan Tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot/populasi*).

2.1.5 Tujuan dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024

Renstra BPJN Jayapura 2020 – 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Renstra BPJN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020 - 2024 merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. **BPJN Jayapura sebagai Unit Kerja/UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga menjalankan tugas dan fungsi serta menetapkan tujuannya sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga** sebagai berikut:

T U J U A N (BPJN Jayapura)

- T.1 Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
- T.2 Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;
- T.3 Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
- T.4 Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan BPJN Jayapura.

Sebelum masuk kedalam pembahasan sasaran kegiatan, untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura di atas selanjutnya akan diulas mengenai sasaran strategis dan turunannya dalam mewujudkan tercapainya target pelaksanaan program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen sesuai dengan data matriks kinerja Ditjen Bina Marga pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka sasaran strategis sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- b. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- c. *Rating Keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik *blackspot* per populasi).

2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Tabel di bawah ini akan menjabarkan angka target Indikator Kinerja Program yang terkait dengan infrastruktur jalan khususnya yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia dan di Provinsi Papua, sebagai berikut :

Tabel II.1
Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	80.7	81.8	82.8	84.6	85.8	87.9	87.9
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.91	2.70	2.63	2.61	2.57	2.50	2.50

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	3.52	3.51	3.14	2.95	2.89	2.82	2.82
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua

Tabel II.2
Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk Provinsi Papua

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	76.2	76.2	78.6	78.6	78.6	81.0	78.60
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.91	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	1.70	1.70	1.70	1.70	1.00	1.00	1.42
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

*Catatan : Untuk nilai IKU Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi, dan Rating Keselamatan memakai angka matriks nilai IKU dari KSJJ untuk Prov. Papua, untuk nilai IKU Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR mengacu ke nilai IKU yang diperoleh dari KSJJ, belum ada nilai IKU khusus untuk BPJN Jayapura

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tersebut, sesuai dengan data matriks kinerja Bina Marga yang terdapat pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024, terdapat 4 (empat) kegiatan yang diturunkan pada unit eselon II di dalam organisasi Ditjen Bina Marga yaitu:

Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas

1. **Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Balai Pelaksana Jalan);**
2. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol (BPJT);
3. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ((9 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Jenderal Bina Marga).

Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga (Setditjen BM, Output Layanan Perkantoran seluruh Unit Kerja Teknis dan Balai BM).

Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan Ditjen Bina Marga difokuskan pada kegiatan 1 yaitu "**Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional**" dikarenakan kegiatan tersebut berdampak langsung pada pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Ditjen Bina Marga, dimana pada kegiatan 1 tersebut terdapat sasaran kegiatan "Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan" dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Adapun output kegiatan yang juga menjadi sasaran untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura dan mendukung tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, yang terdiri dari :
 - Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan;
 - Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan
2. Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional, yang terdiri dari :
 - Panjang Jalan yang terpelihara;
 - Panjang Jalan yang ditingkatkan;
 - Panjang Jembatan yang terpelihara;
 - Panjang Jembatan yang ditingkatkan;
 - Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun;
 - Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun;
 - Panjang Jembatan yang Dibangun;
 - Dukungan Jalan Daerah.
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
5. Layanan Perkantoran.

Output-output kegiatan di atas selanjutnya mendasari perumusan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan BPJN Jayapura. Adapun sasaran kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura pada periode tahun 2020 – 2024 yang terdapat pada Dokumen Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya Ruas Jalan sepanjang 823,14 km;
2. Ruas Jalan Baru yang dilakukan peningkatan sepanjang 54,25 km;
3. Terbangunnya Ruas Jalan sepanjang 60,20 km;
4. Terbangunnya Ruas Jembatan sepanjang 570,08 m;
5. Terpeliharanya Ruas Jalan Nasional sepanjang 1.255,37 km;
6. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi sepanjang 137,83 km;
7. Jembatan yang dilakukan preservasi rutin sepanjang 16.059,90 m;
8. Jembatan yang dilakukan preservasi sepanjang 6.915,90 m;
9. Jembatan yang dilakukan penggantian sepanjang 2.292,27 m;
10. Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebanyak 5 dokumen;
11. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi untuk menunjang aspek keselamatan jalan sepanjang 6,5 km;
12. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
13. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
14. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

Besaran target keluaran Renstra BPJN Jayapura untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel IV.3** berikut ini:

Tabel II.3
Target Keluaran (Output) Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	SATUAN	TAHUN					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas			76.2	78.6	78.6	78.6	81.0	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	km	259.83	77.52	94.00	177.37	214.42	823.14
2	Panjang Peningkatan Jalan Baru	km	9.55	32.70	12.00	-	-	54.25
3	Panjang Pembangunan Jalan	km	7.95	19.95	2.30	15.00	15.00	60.20
	<i>Pembangunan Jalan s/d Perkerasan</i>	<i>km</i>	<i>2.15</i>	<i>7.70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.85</i>
	<i>Pembentukan Badan Jalan</i>	<i>km</i>	<i>5.80</i>	<i>12.25</i>	<i>2.30</i>	<i>15.00</i>	<i>15.00</i>	<i>50.35</i>
4	Panjang pembangunan jembatan	m	189.23	22.20	112.15	123.25	123.25	570.08
IKSP 2 Rating Kondisi			3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
5	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	1,234.77	1,233.97	1,235.12	1,218.35	1,216.82	1,255.37
6	Panjang Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	20.60	21.40	20.25	37.02	38.56	137.83

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	SATUAN	TAHUN					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
7	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	m	11,682.90	15,312.90	14,305.70	14,633.40	13,187.20	16,059.90
8	Panjang Preservasi Jembatan	m	2,098.50	434.00	1,452.70	1,097.00	1,833.70	6,915.90
9	Panjang Penggantian Jembatan	m	309.27	313.00	301.50	329.50	1,039.00	2,292.27
10	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Dok	1	1	1	1	1	5
IKSP 3 Rating Keselamatan			1.7	1.7	1.7	1.0	1.0	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
11	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	m	-	-	-	5,500.00	1,000.00	6,500.00
IKSP 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola								
IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan								
12	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
13	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
14	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

Alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4
Kebutuhan Pendanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	TAHUN					BIAYA (Rp.) Milyar	
		2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							6,900.88	
IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas							2,275.39	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	10.78	5.24	6.11	11.53	13.94	47.59	
2	Panjang Peningkatan Jalan Baru	56.90	279.93	97.71	-	-	434.53	
3	Panjang Pembangunan Jalan	95.00	293.62	90.73	375.00	375.00	1,229.35	
	<i>Pembangunan Jalan s/d Perkerasan</i>	25.00	126.00	-	-	-	151.00	
	<i>Pembentukan Badan Jalan</i>	70.00	167.62	90.73	375.00	375.00	1,078.35	
4	Panjang pembangunan jembatan	238.37	15.08	98.46	106.00	106.00	563.91	
IKSP 2 Rating Kondisi							4,175.16	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
5	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	201.43	215.53	232.77	237.66	222.42	1,109.80	
6	Panjang Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	137.59	191.10	151.88	277.65	289.16	1,047.38	
7	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	11.68	16.08	15.02	15.37	13.85	71.99	
8	Panjang Preservasi Jembatan	63.50	15.95	53.39	40.31	67.39	240.54	
9	Panjang Penggantian Jembatan	151.49	131.46	126.63	138.39	436.38	984.35	

NO.	TARGET OUTPUT	TAHUN					BIAYA Milyar (Rp.)
	UTAMA RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	
10	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	125.39	134.17	143.56	153.61	164.37	721.10
IKSP 3 Rating Keselamatan							13.01
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional							
11	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	-	-	-	11.91	1.10	13.01
IKSP 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola							437.32
IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan							
12	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0.40	0.43	0.46	0.50	0.53	2.33
13	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	32.88	35.18	37.64	40.28	43.10	189.07
14	Jumlah Layanan Perkantoran	42.76	45.76	48.96	52.39	56.05	245.92

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

2.1.6 Tujuan dan Sasaran Satker BPJN Jayapura 2020-2024

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020 – 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan Satker BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024, serta Renstra BPJN Jayapura 2020 - 2024. Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra BPJN Jayapura 2020 - 2024 selaku entitas di atasnya merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. Adapun dalam menentukan tujuan pelaksanaan kegiatan yang berada dalam lingkup pekerjaan yang ditangani Satker BPJN Jayapura mengacu kepada tujuan entitas di atasnya (BPJN Jayapura) yaitu :

1. Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
2. Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;
3. Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Satker BPJN Jayapura;

Adapun sasaran kegiatan di lingkungan Satker BPJN Jayapura dalam periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebanyak 5 dokumen;
2. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;

3. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
4. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator kinerja *output* dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target *output* dan target *outcome* yang ada pada RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara *bottom up* dan *top down* melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target *outcome* dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2022. Data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Revisi DIPA Terakhir status 5 Desember 2022. Angka volume target dan alokasi anggaran pada PK Revisi ini yang akan menjadi parameter awal dalam pengukuran kinerja Satker BPJN Jayapura di akhir Tahun Anggaran 2022.

2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2022

Tabel di bawah ini akan menyajikan informasi data dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 (Awal) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 (Revisi) antara Kepala Satker BPJN Jayapura dengan Dirjen Bina Marga. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2022 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Tabel II.5** dan **Tabel II.6** di bawah ini :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 (Awal)
Satuan Kerja BPJN Jayapura

			AWAL	
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	98,27 %	100.00 %	
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.89	2.89	
	Rincian Output			
CBR 001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %	
	Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		

Rincian Output			
EBA 962	Layanan Umum		1 Layanan
EBA 994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Tahun 2022 (Awal):
Rp 43.552.314.000,-

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 (Revisi)
Satuan Kerja BPJN Jayapura

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	116.85 %	100.00 %	
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.89	2.76	
	Rincian Output			
CBR 001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP 1 : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola			
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %	
	Rincian Output			
	EBA 962	Layanan Umum		1 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Tahun 2022 (Revisi):
Rp 39.885.729.000,-

Pada Perjanjian Kinerja Awal, untuk output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan terdapat dalam indicator Rating kondisi jalan nasional. Untuk Layanan Umum, Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal terdapat dalam Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 (Awal) BPJN Jayapura namun rinciannya terdapat dalam Catatan Kaki PK tersebut.

2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2022

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 (Revisi) Satker BPJN Jayapura mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, dimana terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian

PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);

2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Empat output yang ditangani oleh Satker BPJN Jayapura di Tahun Anggaran 2022 berkontribusi dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan Satker BPJN Jayapura antara lain sebagai berikut :

1. Adanya revisi *automatic adjustment* belanja pegawai untuk mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemic COVID-19;
2. Adanya revisi penambahan kekurangan belanja pegawai dan pemanfaatan sisa tender.
3. Revisi kewenangan KPA.

Berikut merupakan Tabel Sandingan PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel II. 7 Sandingan PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2022 (PK Awal - Januari)	Target 2022 (PK Revisi - Desember)	Keterangan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100.00 %	100.00 %	
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.89	2,76	
	Rincian Output			
	CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %	
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>			
	Rincian Output			
	EBA 962 Layanan Umum		1 Layanan	
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	
EBB 951 Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit		

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Anggaran Awal

Rp 13,348,793,000

Anggaran Revisi

Rp 12,011,338,000

2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Rp 30,203,521,000
Rp 43,552,314,000

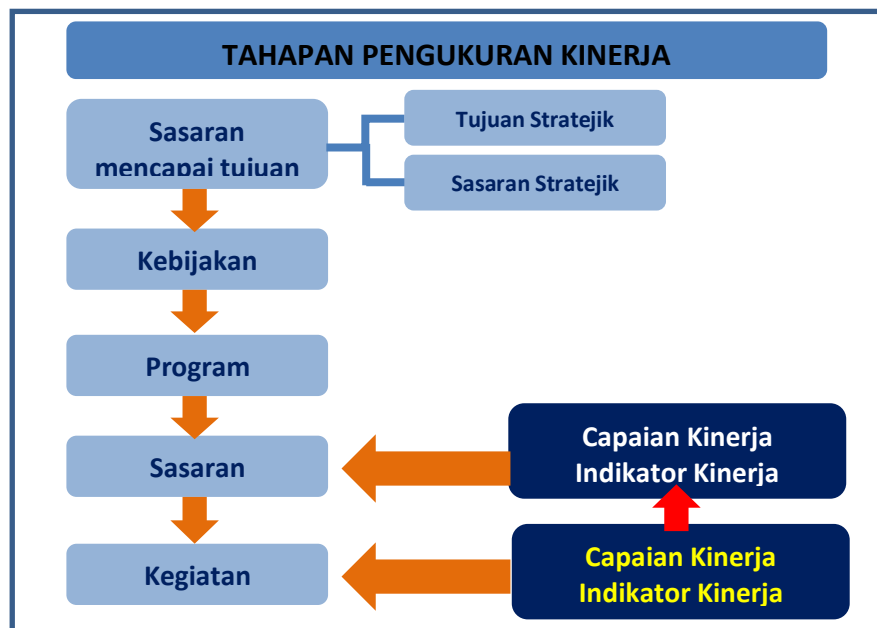
Rp 27,874,391,000
Rp 39,885,729,000

2.3. Metode Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada **Gambar 2.5** di bawah ini:



Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja.

Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan tersebut memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Adapun realisasi kinerja dimonitor dengan kriteria:

- Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya;
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja terbaru.

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja diuraikan pada **Tabel II.8** dan **Tabel II.9** seperti tampak dibawah ini :

Tabel II.8 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data																																														
1. Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional	%	<p>IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kekasaran / <i>Roughness</i> (nilai international roughness index, IRI) Kondisi Permukaan Perkerasan / <i>Pavement Surface Condition</i> (PCI) Sisa Umur Perkerasan / <i>Remaining Useful Life</i> (Pavement Strength) Efektivitas Drainase / <i>Drainage Effectiveness</i> (Surface Drainage and Subsoil Drainage) <p>IRI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skor IKP Roughness</th> <th>Deskripsi</th> <th>Rentang IRI Jalan Berpenutup</th> <th>Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td>IRI < 2</td> <td>IRI < 4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td>2 ≤ IRI < 4</td> <td>4 ≤ IRI < 9</td> </tr> <tr> <td>3*</td> <td>Sedang</td> <td>4 ≤ IRI < 6</td> <td>9 ≤ IRI < 13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rusak Ringan</td> <td>6 ≤ IRI < 8</td> <td>13 ≤ IRI < 14</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rusak Berat</td> <td>IRI ≥ 8</td> <td>IRI ≥ 14</td> </tr> <tr> <td>*3</td> <td>*Sedang</td> <td>*Tidak ada data</td> <td>*Tidak ada data</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report</small></p> <p>PCI, Sisa Umur Perkerasan</p> <p><i>Skala Penilaian KPI PCI</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan</th> <th>Deskripsi</th> <th>Rentang PCI_{final}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td>PCI > 85</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td>70 < PCI ≤ 85</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang</td> <td>55 < PCI ≤ 70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rusak Ringan</td> <td>25 < PCI ≤ 55</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rusak Berat</td> <td>PCI ≤ 25</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition</small></p>	Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup	1	Sangat Baik	IRI < 2	IRI < 4	2	Baik	2 ≤ IRI < 4	4 ≤ IRI < 9	3*	Sedang	4 ≤ IRI < 6	9 ≤ IRI < 13	4	Rusak Ringan	6 ≤ IRI < 8	13 ≤ IRI < 14	5	Rusak Berat	IRI ≥ 8	IRI ≥ 14	*3	*Sedang	*Tidak ada data	*Tidak ada data	Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan	Deskripsi	Rentang PCI _{final}	1	Sangat Baik	PCI > 85	2	Baik	70 < PCI ≤ 85	3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	<ul style="list-style-type: none"> SK Jalan Nasional; Data Rencum Jangka menengah dari KSJJ; Data hasil Survei Kondisi Jalan, Jembatan, Lereng di ruas Jalan Nasional penanganan BPJN Jayapura
Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup																																														
1	Sangat Baik	IRI < 2	IRI < 4																																														
2	Baik	2 ≤ IRI < 4	4 ≤ IRI < 9																																														
3*	Sedang	4 ≤ IRI < 6	9 ≤ IRI < 13																																														
4	Rusak Ringan	6 ≤ IRI < 8	13 ≤ IRI < 14																																														
5	Rusak Berat	IRI ≥ 8	IRI ≥ 14																																														
*3	*Sedang	*Tidak ada data	*Tidak ada data																																														
Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan	Deskripsi	Rentang PCI _{final}																																															
1	Sangat Baik	PCI > 85																																															
2	Baik	70 < PCI ≤ 85																																															
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70																																															
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55																																															
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25																																															

Sasaran Program Satuan

Cara Pengukuran

Sumber Data

1. Menghitung Nilai Struktural Perkerasan / Structural Number of Pavement (SNP)

$$SNP = \frac{1.67}{d_0^{0.75}} \quad \text{(Rumus 6)}$$

Dimana :

- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- d_0 = defleksi sensor d_0 FWD yang sudah dinormalisasi ke beban 50 kN (microns)

2. Menghitung Sisa Kapasitas Struktural / Remaining Structural Capacity (CAP)

$$CAP = \left(\frac{[SNP - (K_f \cdot 1.05)]}{[K_g \cdot 2.135]} \right)^{1/K_c \cdot 0.175} \quad \text{(Rumus 7)}$$

Dimana :

- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- K_f, K_g, K_c = faktor kalibrasi berdasarkan tipe perkerasan (aspal full depth digunakan sebagai default)

Jenis Perkerasan	K_f	K_g	K_c
Aspal Tipis Tak Terikat	1.650	0.925	2.100
Aspal Tipis Stabilised	1.700	0.700	2.800
Aspal Full Depth	0.000	1.930	0.610

Sumber: KIAT IRAMS-DC IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

3. Menghitung Sisa Umur Perkerasan / Remaining Structural Life (RSL)

$$RSL = \frac{LN \left(\frac{CAP \cdot r + MESA \cdot (1+r)}{MESA} \right)}{LN(1+r)} - 1 \quad \text{(Rumus 8)}$$

Dimana :

- RSL = Sisa Umur Perkerasan (dalam tahun)
- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- r = Laju pertumbuhan lalu lintas

Apabila data lendutan/defleksi tidak tersedia, nilai RSL dapat diperoleh dengan pendekatan terhadap nilai IRI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{\ln \frac{IRI - 1.52}{6.48}}{-0.074} \quad \text{(Rumus 9)}$$

Jika IRI = 0 atau tidak ada data, maka diambil nilai RSL = 9 (tahun)

Jika IRI < 2, maka diambil nilai RSL = 35 (tahun)

Bila nilai RSL_{IRI} kurang dari 0, maka diambil nilai RSL = 0 sesuai persamaan berikut:

$$RSL_{approx} = \max(RSL_{IRI}, 0) \quad \text{(Rumus 10)}$$

Nilai RSL_{final} adalah nilai minimum antara RSL_{approx} atau 50 sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{final} = \min(RSL_{approx}, 50) \quad \text{(Rumus 11)}$$

Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan

Skor IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan	Deskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	RSL > 15
2	Baik	10 < RSL ≤ 15
3	Sedang	5 < RSL ≤ 10
4	Rusak Ringan	1 < RSL ≤ 5
5	Rusak Berat	RSL ≤ 1

Efektivitas Drainase

Skala Penilaian KPI Efektivitas Drainase Permukaan

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Permukaan	Deskripsi	Kombinasi PCI dan Terrain Datar		Kombinasi PCI dan Terrain Berbukit/Pegunungan	
		Rentang PCI _{datar}	Terrain	Rentang PCI _{datar}	Terrain
1	Sangat Baik	PCI > 85	Datar	PCI > 70	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	70 < PCI ≤ 85	Datar	55 < PCI ≤ 70	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	Datar	25 < PCI ≤ 55	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	Datar	PCI ≤ 25	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	Datar		

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Sasaran Program Satuan

Cara Pengukuran

Sumber Data

Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	Terrain
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak / Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Buruk Ringan	Ya	Datar
5	Buruk Berat	Tidak / Tidak ada data	Datar

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi		Deskripsi
Medan (Terrain)	Berbukit/Pegunungan	-1 Semakin Baik
Bahu	Tanpa bahu	+1 Semakin Buruk
	Lebih tinggi dari permukaan jalan	+1 Semakin Buruk

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Efektivitas Drainase Permukaan

Efektivitas Drainase Permukaan	
Sub-komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi permukaan jalan	40%
Rutting (luas dan tingkat keparahan)	40%
Kondisi bahu	20%

Efektivitas Drainase Subsoil

Sub-komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi struktural	50%
Serviceability	50%

Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektivitas Drainase	15%

Tabel II.9 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/ Output Fisik

No	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
	Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional			
1	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Layanan	realisasi Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan yang terpenuhi	E-monitoring SIPP
	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			

No	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
2	Layanan Umum	Layanan	realisasi Layanan Umum yang terpenuhi	E-monitoring SiPP
3	Layanan Perkantoran	Layanan	realisasi Layanan Perkantoran yang terpenuhi	E-monitoring SiPP
4	Layanan Sarana Internal	Layanan	realisasi Layanan Sarana Internal yang terpenuhi	E-monitoring SiPP

Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel diatas, didalam memperoleh data kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satker BPJN Jayapura baik bulanan maupun pertahun telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sistem Informasi *Integrated electronic Monitoring* (emonitoring.pu.go.id) dan SiPP (sipp.pu.go.id) sebagai basis data yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan berkoordinasi dengan petugas e-Monitoring/ SiPP dan juga PPK dan Kasatker terkait.

2.4. Target Tahun Ini Menurut Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra BPJN Jayapura tahun 2020-2024, merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura. Dokumen Perencanaan Lainnya ini menjadi arahan bagi setiap kegiatan dalam lingkup Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat Jenderal Bina Marga atau Kementerian PUPR.

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan Target Perjanjian Kinerja Satker BPJN Jayapura pada PK Tahun Anggaran 2022 dengan Target Tahun 2022 pada Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel II.10 Sandingan Target Perjanjian Kinerja dengan Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura di Tahun 2022

NO	OUTPUT	SAT	TARGET 2022			KETERANGAN
			TARGET DOK. PRC SATKER	PK AWAL	PK REVISI AKHIR	
1	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1			Target untuk output ini tidak terdapat pada pelaksanaan TA 2022.

NO	OUTPUT	SAT	TARGET 2022			KETERANGAN
			TARGET DOK. PRC SATKER	PK AWAL	PK REVISI AKHIR	
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1			Target untuk output ini tidak terdapat pada pelaksanaan TA 2022.
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1			Target untuk output ini tidak terdapat pada pelaksanaan TA 2022.
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	Target dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan yang terdapat dalam Renstra
5	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen		1	1	Target untuk nama output ini tidak terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020-2024 dikarenakan terdapat perubahan nama klasifikasi rincian output pada pelaksanaan TA 2022
6	Layanan Sarana Internal	Unit		1	1	Target untuk nama output ini tidak terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020-2024 dikarenakan terdapat perubahan nama klasifikasi rincian output pada pelaksanaan TA 2022
7	Layanan Umum	Layanan		1	1	Target untuk nama output ini tidak terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020-2024 dikarenakan terdapat perubahan nama klasifikasi rincian output pada pelaksanaan TA 2022

Sumber : Renstra 2020-2024 dan PK 2022 Satker BPJN Jayapura

Dari tabel sandingan di atas, terlihat perbedaan antara target output yang tercantum di Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura Tahun 2022 dengan Target Perjanjian Kinerja (Awal dan Revisi) Tahun Anggaran 2022. Untuk Satker BPJN Jayapura, secara keseluruhan hal ini disebabkan oleh adanya perubahan penamaan output sesuai dengan yang tertera pada dokumen DIPA dan Perjanjian Kinerja Satker BPJN Jayapura seperti yang sudah dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel di atas

BAB III

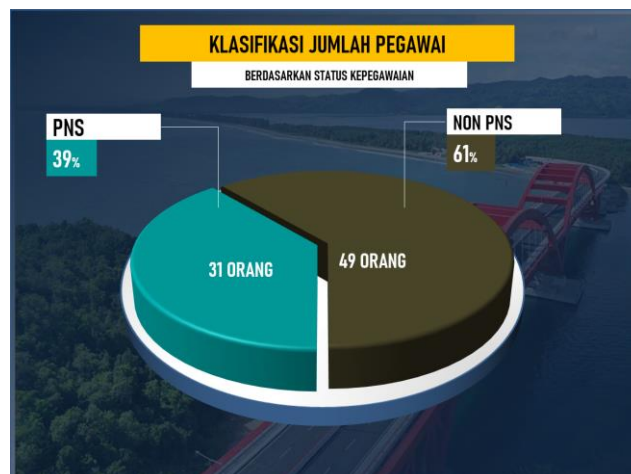
KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari BPJN Jayapura didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 80 orang pegawai baik yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan BPJN Jayapura yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut:

3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai Satker BPJN Jayapura dengan jumlah 80 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.1** sebagai berikut :

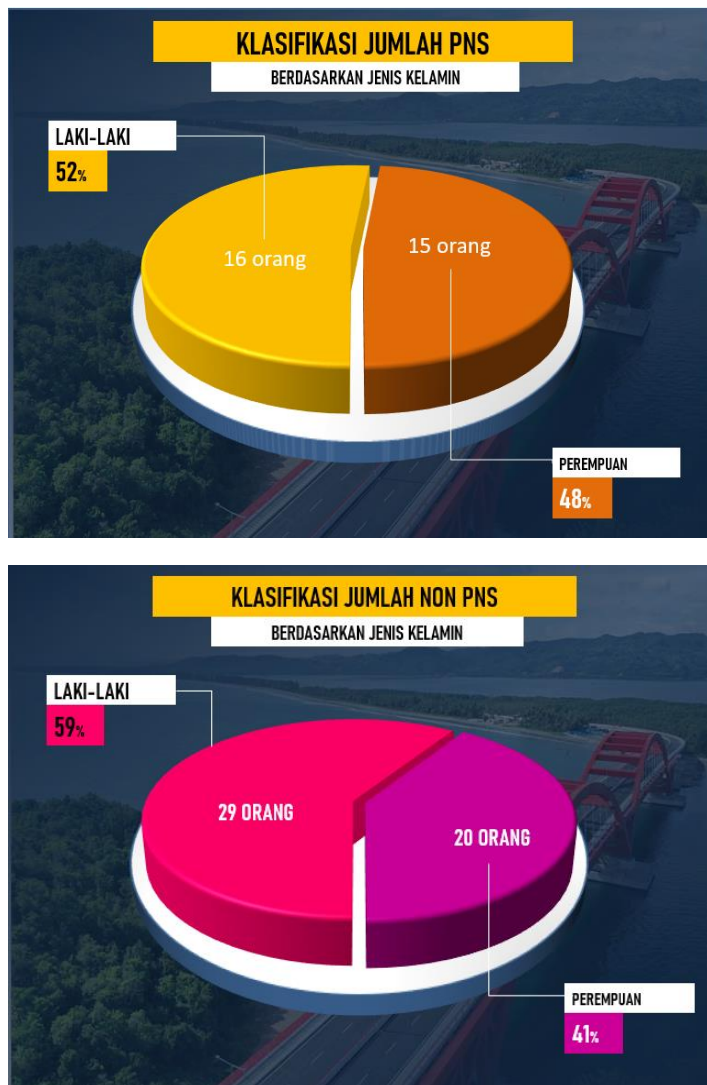


Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS mendominasi jumlah pegawai yang ada di Satker BPJN Jayapura yaitu sebanyak 49 pegawai berstatus Non PNS dan 31 orang berstatus PNS dimana diantaranya ada yang berstatus PNS Daerah sebanyak 1 orang dan PNS Pusat sebanyak 30 orang.

3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan total jumlah pegawai Satker BPJN Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai Satker BPJN Jayapura (status pegawai PNS dan Non PNS) berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dan perempuan sebanyak 35 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.2** sebagai berikut :

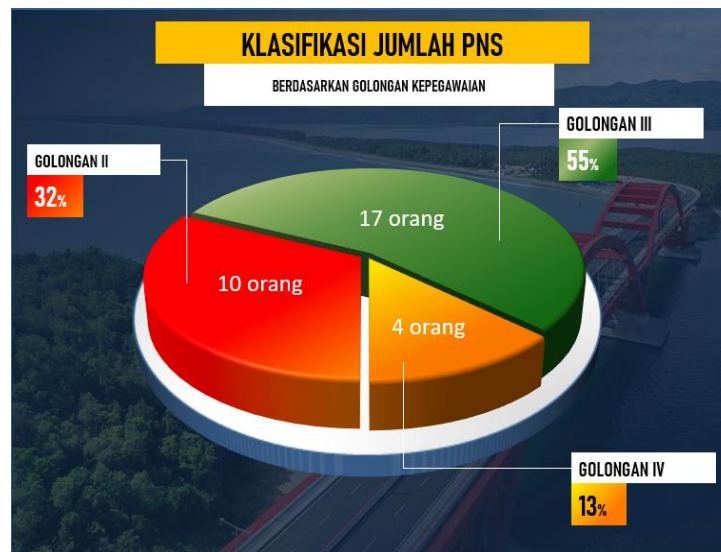


Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai laki-laki berstatus PNS yaitu sebanyak 16 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan berstatus PNS sebanyak 15 orang. Untuk pegawai dengan status Non PNS, jumlah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 29 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 20 orang.

3.1.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Pengelompokan jumlah Pegawai Negara Sipil (PNS) berdasarkan golongan terlihat pada **Gambar 3.3** berikut :

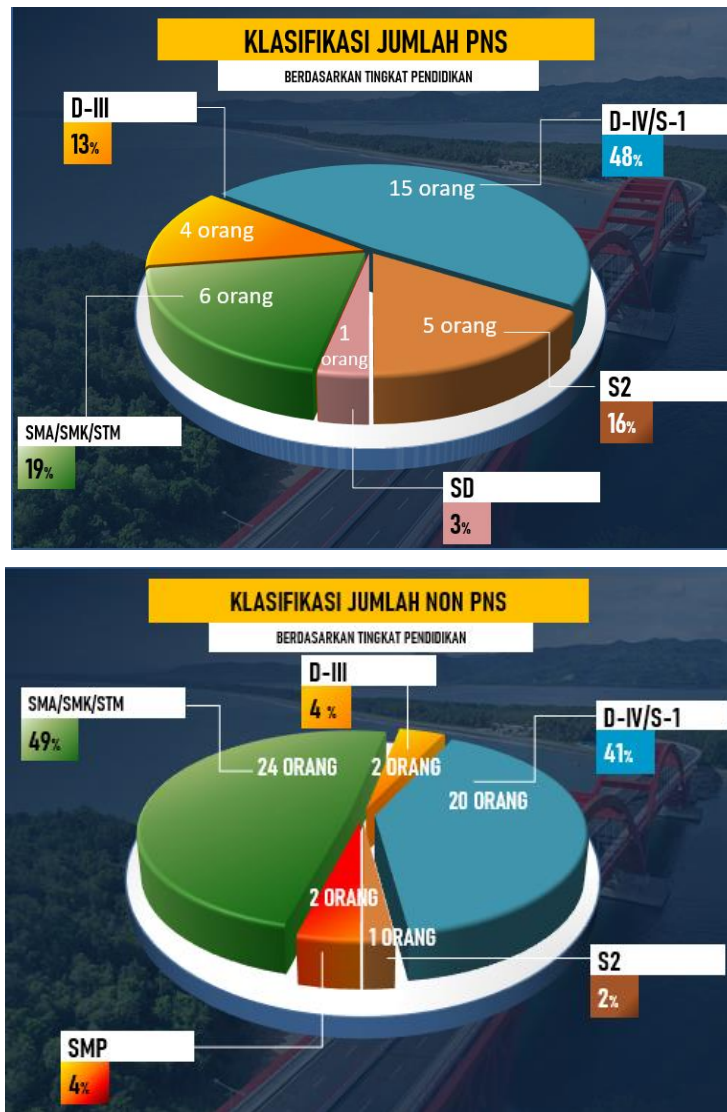


Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan diagram di atas, dari total jumlah PNS sebanyak 31 orang, PNS dengan Golongan III merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 17 orang, disusul Golongan II sebanyak 10 orang, Golongan IV sebanyak 4 orang.

3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut pendidikan dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat Strata 2, Strata 1/ Diploma IV, Diploma III, SMA/K/STM, SMP dan SD. Di bawah ini kami sajikan informasi klasifikasi tingkat pendidikan yang dibagi berdasarkan status pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan Satker BPJN Jayapura, sebagai berikut.



Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

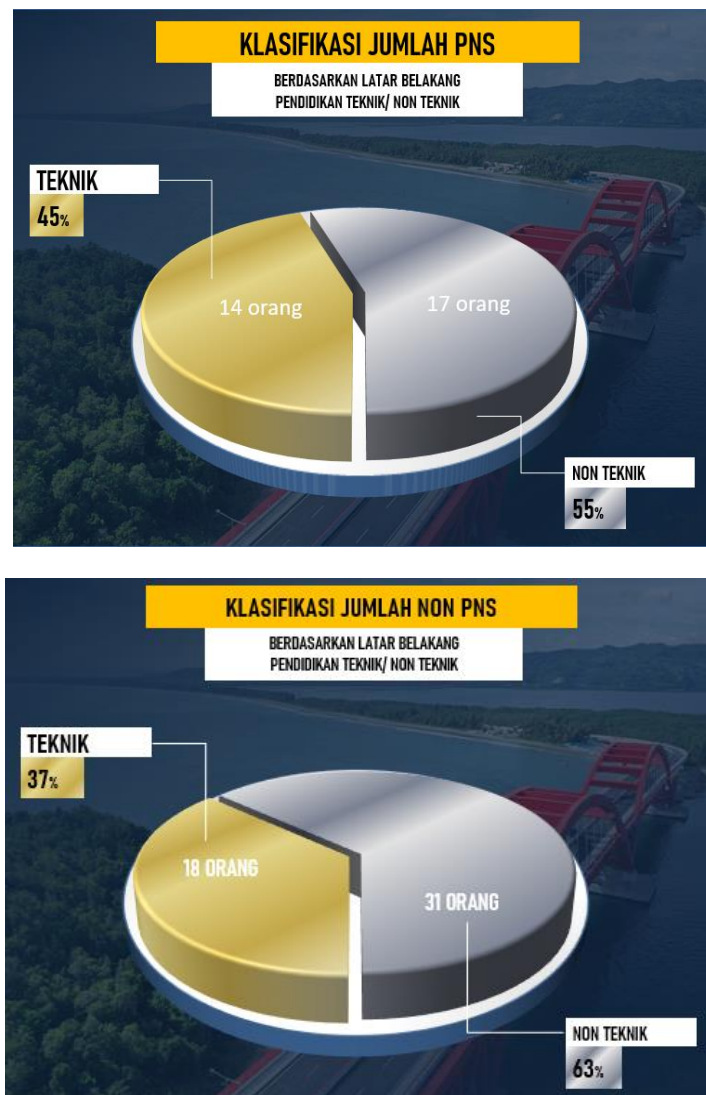
Dapat disimpulkan bahwa kualitas latar belakang pendidikan pegawai di Satker BPJN Jayapura secara total (PNS dan Non PNS) tergolong cukup baik, didominasi oleh tingkat pendidikan S1/ DIV sebanyak 35 orang disusul SMA/K/STM sebanyak 30 orang, DIII sebanyak 6 orang, S2 sebanyak 6 orang, dan latar belakang pegawai dengan tingkat pendidikan terendah SMP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 1 orang.

Adapun latar belakang pendidikan pada pegawai dengan status PNS juga didominasi oleh tingkat pendidikan S1/ DIV sebanyak 15 orang, kemudian SMA/K/STM sebanyak 6 orang, S2 sebanyak 5 orang, D-III sebanyak 4 orang, SD sebanyak 1 orang, dan tingkat pendidikan SMP tidak ada. Untuk Pegawai dengan status Non PNS, latar belakang pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/K/STM sebanyak 24 orang (16 diantaranya bekerja sebagai pegawai non substantif/ pendukung (pramubakti, supir, satpam)), kemudian S1/ DIV sebanyak 20 orang, D-III dan SMP masing-masing sebanyak 2 orang, serta S2 sebanyak 1 orang.

Berdasarkan data di atas, dapat dijadikan pertimbangan bagi Bidang Kepegawaian untuk memberikan perhatian khususnya terkait perluasan kesempatan untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui keikutsertaan pegawai pada kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas dan keterampilan pegawai yang akan berujung pada peningkatan kinerja pegawai di Satker BPJN Jayapura kedepannya.

3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan teknik & non teknik hanya diperhitungan pada pegawai dengan tingkat pendidikan mulai dari DIII, DIV/ S1, dan S2 yang dibagi berdasarkan jurusan yang bersifat teknik maupun non teknik. Informasi ini dapat dilihat pada **Gambar 3.5** berikut :

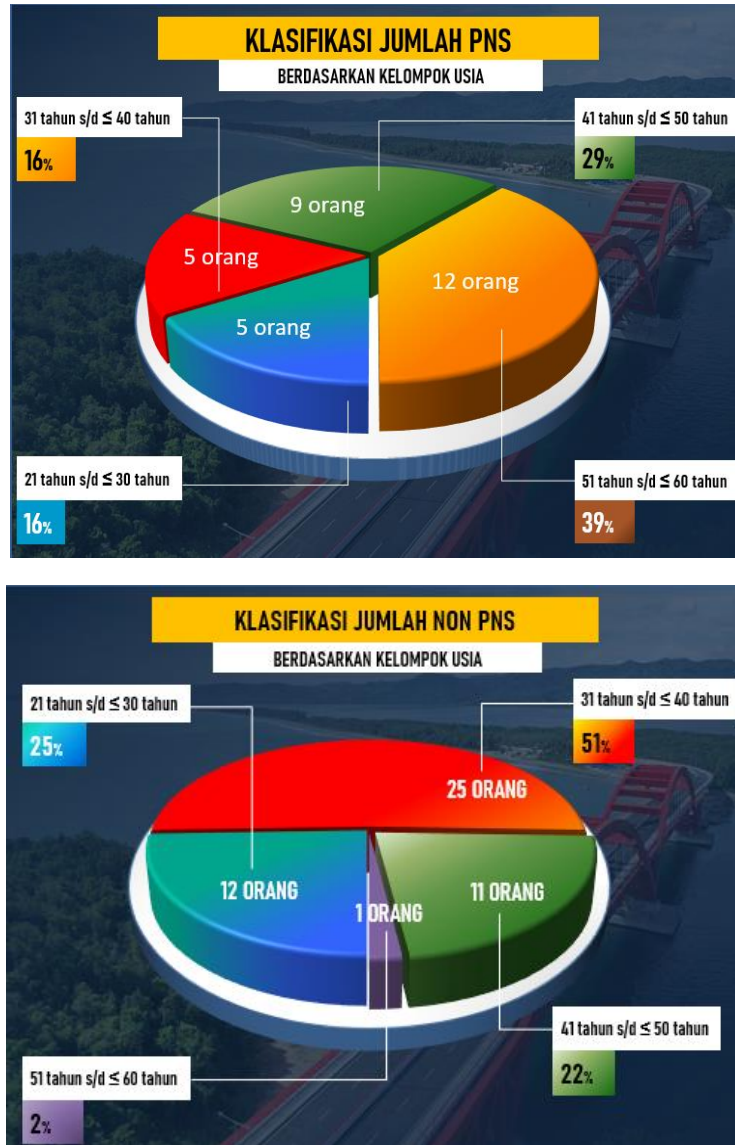


Gambar 3.5 Klasifikasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik

Jumlah pegawai dengan status PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 14 orang dan non teknik sebanyak 17 orang, sedangkan jumlah pegawai dengan status Non PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 18 orang dan non teknik sebanyak 31 orang.

3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada **Gambar 3.6** dibawah ini :



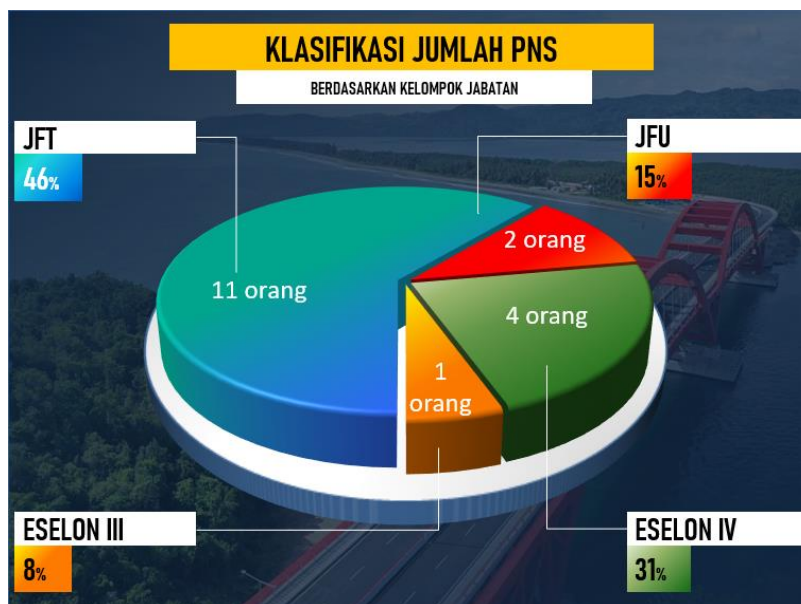
Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Dari diagram di atas, diperoleh informasi untuk Pegawai PNS, yang mendominasi kelompok usia 51 tahun s/d ≤ 60 tahun yaitu sebanyak 12 orang dari total sebanyak 31 pegawai berstatus PNS pada Satker BPJN Jayapura.

Adapun untuk Pegawai Non PNS, yang mendominasi kelompok usia 31 tahun s/d ≤ 40 tahun sebanyak 24 orang dari total sebanyak 49 orang berstatus Non PNS pada Satker BPJN Jayapura.

3.1.7 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kelompok Jabatan

Klasifikasi jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat pada **Gambar 3.7** dibawah ini:



Gambar 3.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

Dari diagram di atas diperoleh informasi bahwa jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan di lingkungan Satker BPJN Jayapura didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 11 orang, sedangkan untuk Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2 orang, untuk jabatan Eselon IV sebanyak 4 orang dan Eselon III sebanyak 1 orang.

Secara rinci, Komposisi Pegawai di lingkungan Satker BPJN Jayapura dapat dilihat pada **Tabel III.1** di bawah ini :

Tabel III.1 Komposisi Pegawai di lingkungan Satker BPJN Jayapura

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BPJN Jayapura
1	Jumlah pegawai BPJN Jayapura	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> Pusat	30	37.50
	>> Daerah	1	1.25
	Non-PNS	49	61.25

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BPJN Jayapura
	>> <i>Substantif</i>	29	36.25
	>> <i>Pendukung</i>	20	25.00
2	Jumlah pegawai menurut jenis kelamin	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>Pria</i>	16	20.00
	>> <i>Wanita</i>	15	18.75
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>Pria</i>	29	36.25
	>> <i>Wanita</i>	20	25.00
3	Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>S2</i>	5	5.00
	>> <i>DIV/ S1</i>	15	20.00
	>> <i>DIII</i>	4	5.00
	>> <i>SMA/SMK/STM</i>	6	7.50
	>> <i>SMP</i>	0	0.00
	>> <i>SD</i>	1	1.25
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>S2</i>	1	1.25
	>> <i>DIV/ S1</i>	20	25.00
	>> <i>DIII</i>	2	2.50
	>> <i>SMA/SMK/STM</i>	24	30.00
	>> <i>SMP</i>	2	2.50
	>> <i>SD</i>	0	0.00
4	Jumlah pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan Teknik-Non Teknik	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>Teknik</i>	14	17.50
	>> <i>Non Teknik</i>	17	21.25
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>Teknik</i>	18	22.50
	>> <i>Non Teknik</i>	31	38.75
5	Jumlah pegawai menurut kelompok usia	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>51 tahun s/d ≤ 60 tahun</i>	12	12.50

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BPJN Jayapura
	>> 41 tahun s/d ≤ 50 tahun	9	12.50
	>> 31 tahun s/d ≤ 40 tahun	5	7.50
	>> 20 tahun s/d ≤ 30 tahun	5	6.25
	Non-PNS	49	61.25
	>> 51 tahun s/d ≤ 60 tahun	1	1.25
	>> 41 tahun s/d ≤ 50 tahun	11	13.75
	>> 31 tahun s/d ≤ 40 tahun	25	31.25
	>> 20 tahun s/d ≤ 30 tahun	12	15.00
6	Jumlah PNS menurut golongan	31	38.75
	Golongan I	0	0.00
	Golongan II	10	12.50
	Golongan III	17	22.50
	Golongan IV	4	3.75
7	Jumlah pegawai menurut kelompok jabatan	18	22,50
	Eselon III	1	1.25
	Eselon IV	4	5.00
	Staf Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	11	13.75
	Staf Jabatan Fungsional umum (JFU)	2	2.50

Sumber : Data Kepegawaian Satker BPJN Jayapura, 2022

3.2 Sarana Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Satuan Kerja BPJN Jayapura membagi sarana prasarana menjadi 7 golongan dengan informasi yang diperoleh dari Laporan BMN Semester III Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel III.2 Rekapitulasi Jenis Sarana dan Prasarana pada Satuan Kerja BPJN Jayapura

NO	JENIS BMN	KODE BARANG	SALDO AWAL PER 01 Januari 2022		MUTASI BMN				SALDO PER 30 September 2022 (TRIWULAN III TA 2022)	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	TANAH	131111	40.000	152.560.894.232	-	-	-	-	40.000	152.560.894.232
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	1.757	30.688.257.824	1	26.500.000	-	-	1.758	30.714.757.824
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	51	39.140.436.210	-	-	-	-	51	39.140.436.210
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	1	317.281.000	-	-	-	-	1	317.281.000
5	IRIGASI	134112	2	466.565.000	-	-	-	-	2	466.565.000
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	6	41.820.224.831	6	41.820.224.831	6	41.820.224.831	6	41.820.224.831
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	166112	268	25.683.806.270	-	-	-	-	268	25.683.806.270
TOTAL :			42.085	290.677.465.367	7	41.846.724.831	6	41.820.224.831	42.086	290.703.965.367

Sumber : Laporan Gabungan BMN Semester III T.A. 2022

Tabel III.3 Laporan Kondisi Barang pada Satuan Kerja BPJN Jayapura

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	152.560.894.232	39.999	0	0
2	3.01.01.01.001	Crawler Tractor + Attachment	Unit	8.313.373.826	0	0	35
3	3.01.01.01.003	Swamp Tractor + Attachment	Unit	75.000.000	0	0	5
4	3.01.01.03.001	Crawler Excavator + Attachment	Unit	2.882.520.000	1	0	8
5	3.01.01.03.999	Excavator Lainnya	dummy	699.940.000	1	0	0
6	3.01.01.05.003	Dump Truck	Unit	1.591.238.360	5	0	5
7	3.01.01.06.001	Asphalt Mixing Plant	Unit	700.350.000	0	0	3
8	3.01.01.06.003	Asphalt Distributor	Unit	47.499.660	0	0	7
9	3.01.01.06.007	Asbuton Dryer	Unit	246.809.612	0	0	8
10	3.01.01.07.001	Macadam Roller/Three Wheel Roller	Unit	610.450.000	0	0	11
11	3.01.01.07.002	Tandem Roller	Unit	89.000.000	0	0	1
12	3.01.01.07.004	Vibration Roller	Unit	2.837.652.735	9	0	10
13	3.01.01.07.005	Tyre Roller	Unit	4.693.529.000	0	0	5
14	3.01.01.07.006	Soil Stabilizer	Unit	16.234.800	0	0	1
15	3.01.01.07.008	Stamper	Unit	819.600	0	0	2
16	3.01.01.07.009	Vibration Plate	Unit	27.500.000	2	0	0
17	3.01.01.08.003	Stone Chuser	Unit	197.971.000	0	0	2
18	3.01.01.08.005	Batching Plant	Unit	8.703.900	0	0	2
19	3.01.01.08.010	Concrete Cutter	Unit	114.470.631	1	0	0
20	3.01.01.08.011	Concrete Mixer	Unit	13.676.300	1	0	0
21	3.01.01.08.014	Aggregate/Chip Spreader	Unit	10.297.800	0	0	5
22	3.01.01.08.020	Pan Mixer	Unit	122.760.000	0	0	8

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
23	3.01.01.08.022	Paddle Mixer	Unit	498.000.000	0	0	8
24	3.01.01.08.023	Asphalt Buton Crusher	Unit	186.200.000	0	0	12
25	3.01.01.09.001	Track Loader + Attachment	Unit	1.394.512.215	0	0	5
26	3.01.01.09.002	Wheel Loader + Attachment	Unit	3.145.328.800	0	0	18
27	3.01.03.02.002	Belt Conveyor (Feeder)	Unit	140.832.640	0	0	30
28	3.01.03.03.001	Transportable Compressor	Unit	3.354.402	0	0	3
29	3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	Unit	148.540.000	0	0	6
30	3.01.03.05.002	Portable Water Pump	Unit	1.817.165	0	0	4
31	3.01.03.06.003	Mesin Bor Beton	Unit	8.413.500	0	0	13
32	3.02.01.01.002	Jeep	Unit	114.390.000	1	0	3
33	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1.741.700.000	7	0	0
34	3.02.01.03.002	Pick Up	Unit	689.408.000	2	0	11
35	3.02.01.03.004	Semi Trailer	Unit	18.692.400	0	0	1
36	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	37.940.000	3	0	5
37	3.03.01.01.036	Mesin Briket	Buah	121.864.056	16	0	0
38	3.03.02.07.008	Palu	Buah	2.895.460	2	0	0
39	3.03.03.01.072	Global Positioning System	Buah	37.950.000	5	0	0
40	3.03.03.01.141	Distance Meter	unit	64.262.795	3	0	0
41	3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Buah	2.243.400	1	0	0
42	3.03.03.08.039	Desimeter (Hidrometer)	Buah	109.833.000	2	0	0
43	3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1.014.403	1	0	0
44	3.03.03.10.999	Alat Timbangan/Biara Lainnya	dummy	227.568.188	3	0	0
45	3.03.03.15.015	Vernier Caliper	Buah	56.134.630	11	0	0
46	3.03.03.16.999	Specific Set Lainnya	dummy	76.255.300	10	0	0
47	3.04.01.03.006	Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)	Buah	61.673.700	1	0	0
48	3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	Buah	118.637.000	41	0	0
49	3.04.01.05.006	Alat Pengambil Sample Tanah	Buah	691.229.000	20	0	0
50	3.05.01.01.999	Mesin Ketik Lainnya	dummy	1.430.000	1	0	0
51	3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	86.159.000	1	0	0
52	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	14.648.289	1	0	0
53	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	67.334.850	26	0	0
54	3.05.01.05.013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	57.200.000	2	0	0
55	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	20.520.000	7	0	0
56	3.05.01.05.024	Alat Pemotong Kertas	Buah	6.905.800	1	0	0
57	3.05.01.05.037	White Board Electronic	Buah	30.800.000	1	0	0
58	3.05.01.05.044	Mesin Laminating	Buah	2.333.800	1	0	0
59	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	47.186.300	5	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
60	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	11.025.800	3	0	0
61	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	52.889.637	29	0	0
62	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	323.118.874	642	0	0
63	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	13.860.000	3	0	0
64	3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	60.104.000	29	0	0
65	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	30.813.981	1	0	0
66	3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	20.570.000	6	0	0
67	3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	183.161.000	30	0	0
68	3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	12.738.000	5	0	0
69	3.05.02.06.008	Sound System	Buah	25.905.000	1	0	0
70	3.05.02.06.012	Wireless	Buah	3.245.000	1	0	0
71	3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	Buah	1.650.000	1	0	0
72	3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	45.012.000	6	0	0
73	3.05.02.06.059	Kabel Roll	Buah	1.332.936	8	0	0
74	3.06.01.01.007	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Buah	2.232.780	1	0	0
75	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	Buah	17.594.500	4	0	0
76	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	23.285.000	17	0	0
77	3.06.01.01.051	Automatic Voltage Regulator (AVR)	Buah	649.000	1	0	0
78	3.06.01.01.056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	5.940.000	10	0	0
79	3.06.01.01.079	Microphone Cable	Buah	880.000	1	0	0
80	3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	16.740.240	1	0	0
81	3.06.01.02.015	Video Mixer	Buah	8.580.000	1	0	0
82	3.06.01.02.038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	5.576.340	1	0	0
83	3.06.01.02.044	Digital Video Effect	Buah	4.701.180	1	0	0
84	3.06.01.02.055	Lighting Stand Tripod	Buah	880.000	1	0	0
85	3.06.01.02.057	Slide Projector	Buah	51.700.000	1	0	0
86	3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	33.792.000	9	0	0
87	3.06.01.04.014	Mesin Jilid	Buah	7.480.000	2	0	0
88	3.06.01.04.022	Mesin Pres	Buah	229.768.000	1	0	0
89	3.06.01.05.023	Kompas Geologi	Buah	9.229.194	1	0	0
90	3.06.01.05.024	Clinometer	Buah	12.210.000	3	0	0
91	3.06.01.05.025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	13.200.000	3	0	0
92	3.06.01.05.039	Ground Paratrating Radar	Buah	3.003.000	1	0	0

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
93	3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	Buah	6.687.120	7	0	0
94	3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1.705.000	1	0	0
95	3.06.02.02.002	Unit Tranceiver Ssb Transportable	Buah	1.497.000	0	0	3
96	3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	Buah	6.844.200	1	0	0
97	3.06.02.08.999	Alat Komunikasi Khusus Lainnya	dummy	7.656.000	1	0	0
98	3.06.02.09.999	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional Lainnya	dummy	256.455.000	2	0	0
99	3.07.01.01.127	Kursi Dorong	Buah	38.040.000	16	0	0
100	3.07.01.02.010	Infra Red	Buah	6.375.385	1	0	0
101	3.07.01.07.049	Alloca Camera Multioristhal Swaner With Digital Concane Venteven	Buah	18.315.000	5	0	0
102	3.07.01.08.004	Solution Administration Set	Buah	528.940	2	0	0
103	3.07.01.12.032	Parafin Bath	Buah	571.750	5	0	0
104	3.07.01.19.013	Glove Box (Alat Kedokteran Nuklir)	Buah	224.400	1	0	0
105	3.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	Buah	261.294.373	5	0	0
106	3.08.01.05.020	Electric Compression Tester	Buah	316.401.901	1	0	0
107	3.08.01.06.012	Test Press/Strenght Test	Buah	212.846.220	1	0	1
108	3.08.01.06.017	Hardness Test Machine	Buah	62.312.641	1	0	0
109	3.08.01.06.027	Compaction	Buah	219.487.590	4	0	0
110	3.08.01.06.042	Vibrating Unit	Buah	140.934.271	1	0	0
111	3.08.01.06.047	Alat Pemeriksa Semen	Buah	8.000.000	2	0	0
112	3.08.01.06.058	Alat Pemeriksa Beton	Buah	1.940.924.371	56	0	0
113	3.08.01.06.059	Slump Test Set	Buah	9.229.450	2	0	0
114	3.08.01.06.063	Basic Cylinder Capping Set	Buah	94.712.773	3	0	0
115	3.08.01.06.092	Organic Impuriestest Set	Buah	31.008.616	2	0	0
116	3.08.01.07.023	Sand Equivalent	Buah	84.716.928	4	0	0
117	3.08.01.07.029	Cbr Lab. Set Ci.284	Buah	104.705.600	2	0	0
118	3.08.01.07.999	Alat Laboratorium Aspal,Cat Dan Kimia Lainnya	dummy	1.278.119.676	322	0	0
119	3.08.01.08.009	Triaxal CBR	Buah	250.404.504	1	0	0
120	3.08.01.08.024	Liquid Limit	Buah	27.637.277	4	0	0
121	3.08.01.08.034	Modified Field Compaction Mold	Buah	15.843.520	4	0	0
122	3.08.01.08.044	Lightweight Concrete Test Hammer	Buah	66.649.200	2	0	0
123	3.08.01.08.049	Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	Buah	11.666.561	1	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
124	3.08.01.08.053	Vicat Apparatus	Buah	2.564.306	1	0	0
125	3.08.01.08.999	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan Lainnya	dummy	2.003.963.148	19	0	0
126	3.08.01.10.114	Drying Oven	Buah	194.887.275	1	0	0
127	3.08.01.11.002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	79.190.350	2	0	0
128	3.08.01.11.131	Filter Press	Buah	2.487.530	15	0	0
129	3.08.01.11.137	Tripod	Buah	330.000	1	0	0
130	3.08.01.11.156	Mesin Pengayak	Buah	42.245.500	1	0	0
131	3.08.01.11.165	Core Bit	Buah	13.810.190	1	0	0
132	3.08.01.11.215	Liquid Extractor	Buah	11.878.630	1	0	0
133	3.08.01.11.999	Alat Laboratorium Umum Lainnya	dummy	363.441.200	9	0	0
134	3.08.01.12.025	Stabilizer	Buah	56.584.835	8	0	0
135	3.08.01.13.034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	32.560.000	2	0	0
136	3.08.01.15.042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	2.805.000	2	0	0
137	3.08.01.19.005	Mortars & Pastle	Buah	105.790	1	0	0
138	3.08.01.24.012	Rammer	Buah	34.100.000	1	0	0
139	3.08.01.25.999	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Lainnya	dummy	22.598.712	12	0	0
140	3.08.01.30.004	Boring & Milling Machine	Buah	552.982.320	1	0	0
141	3.08.01.33.010	Exhaust Fan (Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	Buah	3.080.000	4	0	0
142	3.08.01.38.029	Deal Tickness Gauge	Buah	1.141.203	1	0	0
143	3.08.01.39.018	Alat Uji Analisa Butiran Bahan (Laboratory Testing Screen)	Buah	62.186.632	1	0	0
144	3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	43.890.000	14	0	0
145	3.08.01.41.070	Drying Test	Buah	12.036.420	2	0	0
146	3.08.01.41.104	Grader	Buah	5.314.213.245	2	0	22
147	3.08.01.41.174	Moisture Tester (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	7.764.800	2	0	0
148	3.08.01.41.251	Stabilizer/UPS	Buah	38.785.200	32	0	0
149	3.08.01.41.319	Waterbath (Shake,Still)	Buah	83.762.800	1	0	0
150	3.08.01.42.001	Alat Ukur	Buah	162.800.000	4	0	0
151	3.08.01.45.023	Kompas (Alat Laboratorium Oceanografi)	Buah	14.190.000	3	0	0
152	3.08.01.49.013	Moisture Content Tester	Buah	29.197.480	2	0	0
153	3.08.01.50.008	Speciment Mount Press	Buah	4.683.360	1	0	0
154	3.08.01.51.024	Wash Bak	Buah	49.500.000	5	0	0

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
155	3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	67.822.150	36	0	0
156	3.08.01.56.083	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	7.382.980	1	0	0
157	3.08.01.56.999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	8.800.000	2	0	0
158	3.08.01.60.005	Cetak Kubus Beton	Buah	27.527.676	42	0	0
159	3.08.01.60.007	Saringan Besi	Buah	39.050.000	1	0	0
160	3.08.01.99.999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1.743.705.180	14	0	0
161	3.08.02.02.007	Bimetal Thermometer	Buah	2.301.300	2	0	0
162	3.08.02.02.031	Specific Gravitometer	Buah	26.805.540	2	0	0
163	3.08.02.02.036	Viscometer Viscosimeter	Buah	44.495.842	1	0	0
164	3.08.02.02.037	Kinematic Viscosety Bath	Buah	226.310.476	1	0	0
165	3.08.02.02.056	Flash Point Tester	Buah	66.516.280	5	0	0
166	3.08.02.03.045	Hot Plate (General Laboratory Tool)	Buah	16.136.666	1	0	0
167	3.08.02.03.098	Laboratory /Service Wagon/Cart	Buah	95.465.680	2	0	0
168	3.08.03.05.001	Generator Set(Lab Scale)	Buah	97.350.000	1	0	0
169	3.08.03.05.002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	1.507.000	1	0	0
170	3.08.06.04.002	Sieve Shaker (Laboratorium Lingkungan)	Buah	8.514.840	1	0	0
171	3.08.06.05.999	Alat Laboratorium Penunjang Lainnya	dummy	16.442.100	2	0	0
172	3.08.07.02.007	Universal Primary Calibrator/Weights	Buah	172.080	2	0	0
173	3.08.07.14.007	Wireless Data Tranmission System	Buah	4.543.000	7	0	0
174	3.08.08.09.013	Viscosity Test Set	Buah	553.068.110	1	0	0
175	3.08.08.10.999	Alat Laboratorium Uji Perangkat Lainnya	dummy	252.064.566	2	0	0
176	3.09.02.01.011	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Buah	64.096.032	2	0	0
177	3.09.02.01.049	Diamond Bit Dio 4	Buah	26.628.088	2	0	0
178	3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	15.278.800	2	0	0
179	3.09.04.09.067	Ultrasonic Thickness Gauge	Buah	32.310.258	2	0	0
180	3.09.04.09.089	Magnifier	Buah	911.610	1	0	0
181	3.09.04.09.123	Automatic Cleveland Open Cup Flash	Buah	340.070.824	1	0	0
182	3.09.04.09.172	Mesin Uji Tarik	Buah	509.264.383	1	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
183	3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	515.198.915	42	0	0
184	3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	750.461.000	42	0	0
185	3.10.01.02.003	Note Book	Buah	298.387.000	16	0	0
186	3.10.01.02.009	Tablet PC	Buah	22.880.000	4	0	0
187	3.10.02.01.012	Hard Disk	Buah	18.562.500	15	0	0
188	3.10.02.01.017	Panaboard	Buah	26.500.000	1	0	0
189	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	423.192.698	73	0	0
190	3.10.02.04.002	Router	Buah	2.508.000	1	0	0
191	3.11.01.02.012	Fieldmeter	Buah	27.986.780	2	0	0
192	3.11.01.02.017	Penetrometer (Ukur/instrument)	Buah	86.344.720	1	0	0
193	3.13.03.01.009	Air Dryer	Buah	14.865.488	2	0	0
194	3.15.04.05.001	Genset	Buah	693.385.000	2	0	0
195	3.17.01.01.007	Centrifuge Extractor	Buah	13.884.646	1	0	0
196	3.18.02.06.002	Sodium High Pressure Flood Light	Unit	102.770	20	0	0
197	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	18.219.815.000	5	1	0
198	4.01.01.01.999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	3.537.426.000	2	0	0
199	4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	192.875.210	1	0	0
200	4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	70.045.000	0	1	0
201	4.01.01.11.001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	858.568.000	0	1	0
202	4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	109.118.000	1	0	0
203	4.01.01.32.001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	11.927.000	1	0	0
204	4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	848.158.000	1	0	0
205	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1.528.665.000	2	0	0
206	4.01.02.02.011	Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen	Unit	6.359.664.000	23	0	0
207	4.01.02.02.014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Unit	3.026.957.000	9	0	0
208	4.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	998.100.000	1	0	0
209	4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	3.391.045.000	3	0	0
210	5.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	M2	317.281.000	1	0	0
211	5.02.04.05.007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Unit	466.565.000	2	0	0

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
212	6.07.04.01.001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	dummy	41.820.224.831	6	0	0
213	8.01.01.01.007	Hasil Kajian/Penelitian	dummy	2.972.759.099	2	0	0

3.3 DIPA

3.3.1 Perubahan Anggaran

Pada bulan November 2022 Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA awal Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2022. Pada pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2022 terdapat perubahan DIPA sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Awal Tahun 2022	: Rp. 43.552.314.000,-
Jumlah Anggaran Revisi Tahun 2022	: Rp. 39.885.729.000,-

Tidak terdapat perubahan anggaran yang dikelola oleh Satker BPJN Jayapura berdasarkan data Perjanjian Kinerja Revisi 9 November 2022 dengan Revisi DIPA terakhir yang terjadi di 5 Desember 2022. Kronologis perubahan DIPA di lingkungan Satker BPJN Jayapura yang terjadi di sepanjang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. III.4 Kronologis Revisi DIPA pada Satker BPJN Jayapura TA. 2022

NO.	NOMOR DIPA	TANGGAL PENGESAHAN	NO. DS	KEWENANGAN REVISI	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
SATUAN KERJA BPJN JAYAPURA								
1	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	17-Nov-21	7569-6700-4702-8898	-	43.552.314.000	-	-	DIPA AWAL
2	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	14-Dec-21	5334-8672-0235-8720	Direktorat Jenderal Anggaran	43.552.314.000	43.552.314.000	Revisi Automatic Adjustment yaitu Blokir alokasi anggaran belanja pegawai dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19	DIPA TETAP
3	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	17-Feb-22	5334-8672-0235-8720	Kanwil	43.552.314.000	43.552.314.000	Revisi kewenangan KPA dan perubahan nama paket Survey	DIPA TETAP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022

NO.	NOMOR DIPA	TANGGAL PENGESAHAN	NO. DS	KEWENANGAN REVISI	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
							Kondisi Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura	
4	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	06-Okt-22	7168-1454-1797-6384	Direktorat Jenderal Anggaran	43.552.314.000	40.357.433.000	Revisi Buka Blokir Automatic Adjustment Belanja Pegawai	DIPA BERKURANG
5	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	27-Okt-22	5370-4453-0184-7077	Direktorat Jenderal Anggaran	40.357.433.000	39.486.156.000	Revisi Penambahan Kekurangan Belanja Pegawai dan Pemanfaatan Sisa Tender	DIPA BERKURANG
6	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	09-Nov-22	0650-0500-2705-6610	Direktorat Jenderal Anggaran	39.486.156.000	39.885.729.000	Revisi Penambahan Alokasi Belanja Pegawai dan Revisi Kewenangan KPA	DIPA BERTAMBAH
7	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	24-Nov-22	0650-0500-2705-6610	Kanwil	39.885.729.000	39.885.729.000	Revisi Kewenangan KPA dan Halaman III DIPA	DIPA TETAP
8	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	30-Nov-22	0650-0500-2705-6610	POK	39.885.729.000	39.885.729.000	Revisi DIPA kewenangan KPA	DIPA TETAP
9	SP DIPA-033.04.1.448013/2022	05-Dec-22	0650-0500-2705-6610	POK	39.885.729.000	39.885.729.000	Revisi DIPA kewenangan KPA	DIPA TETAP

Sumber : Data dan Informasi Satker BPJN Jayapura, 2022

Pada bulan Februari terdapat revisi DIPA dengan alasan perubahan adalah revisi Automatic:Adjustment yaitu blokir alokasi anggaran belanja pegawai dalam rangka mitigasi dampak berlanjutannya dan memburuknya kondisi jalan dan jembatan BPJN Jayapura. Perubahan ini tidak menyebabkan perubahan nilai DIPA Satker BPJN Jayapura sehingga nilai DIPA tetap Rp. 43.552.314.000,-. Di bulan Oktober terjadi revisi DIPA sebanyak dua kali, yang pertama perubahan terjadi karena pemblokiran Automatic Adjustment belanja pegawai dibuka dan dari perubahan ini nilai DIPA menjadi Rp. 40.357.433.000,-. Perubahan kedua di bulan Oktober terjadi dengan alasan perubahan penambahan kekurangan belanja pegawai dan pemanfaatan sisa tender, perubahan ini mengurangi nilai DIPA menjadi Rp. 39.486.156.000,-.

Pada bulan November juga terdapat perubahan DIPA sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 9 November dengan alasan perubahan adalah revisi penambahan alokasi belanja pegawai dan revisi kewenangan KPA. Perubahan ini menyebabkan nilai DIPA bertambah menjadi Rp. 39.885.729.000. Perubahan selanjutnya terjadi pada 24 November dengan alasan perubahan adalah revisi kewenangan KPA dan halaman III DIPA, pada perubahan nilai DIPA tidak berubah. Pada 30 November dan 5 Desember mengalami perubahan DIPA dengan alasan Revisi DIPA kewenangan KPA dan nilai DIPA tetap yaitu Rp. 39.885.729.000.

Lembar Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2022 Awal dan Revisi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura yang sudah ditandatangani oleh Kepala Balai dan Direktur Jenderal Bina Marga Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran dokumen LKIP ini.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan SAKIP;
- b. Rencana Strategis;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Pengelolaan Data Kinerja;
- f. Pelaporan Kinerja; dan
- g. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja yang juga diterapkan pada pelaksanaan SAKIP di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dapat dilihat pada **Gambar 4.1** berikut ini:

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
		banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	0% - 30%	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun Anggaran 2022 Satker BPJN Jayapura telah mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024 yaitu Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen. Adapun kedua program tersebut masing-masing memiliki Sasaran Program sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- b. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- c. *Rating keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi).

2. Meningkatkan dukungan manajemen birokrasi yang professional, tepat, cepat, dan akuntabel

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Adapun masing-masing indikator kinerja program tersebut diukur tingkat capaiannya di tahun 2022 dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2022 Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura tahun 2020-2024. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program T.A. 2021 Satker BPJN Jayapura tahun 2022 mengacu pada angka hasil capaian entitas di atasnya dalam hal ini BPJN Jayapura, antara lain sebagai berikut :

1. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)

IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari empat komponen yaitu:

- Kekasaran / *Roughness* (nilai international roughness index, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (Pavement Strength)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5. Dari hasil perhitungan empat komponen di atas dan memperhatikan pembobotan sebagai berikut :

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektivitas Drainase	15%

Maka didapat nilai Rating Kondisi Jalan Nasional wilayah penanganan BPJN Jayapura :

Baseline 2021 : 2,89 dengan nilai Kemantapan 88,18% (*menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03)

Target 2022 : 2,76 (Sumber : Hasil perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03)

Capaian 2022 : 2,76 (*menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03) dengan nilai Kemantapan 85%

2. *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*

Baseline 2021 : 63,35% (Sumber : Data Matriks KSJJ)

Target 2022 : 100 % (Sumber : Data Matriks KSJJ)

Capaian 2022 : 100 % (Sumber : Data Matriks KSJJ)

Sehingga Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BPJN Jayapura TA. 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BPJN Jayapura TA. 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	BASELINE 2021*	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Rating Kondisi Jalan Nasional		2.89	2.76	2,76	100,00	
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	63.35	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03 dan acuan Data Kaki Matriks KSJJ

Untuk mendukung program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, terdapat dukungan dari output-output yang masing-masing memiliki target yang telah ditentukan di dokumen Perjanjian Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2022. Adapun capaian kinerja untuk output-output yang mendukung

capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR yang ditangani oleh Satker BPJN Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Capaian Kinerja Output Pendukung Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Satker BPJN Jayapura Tahun 2022

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KET	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR		
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional									
Indikator Kinerja Kegiatan									
1	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1	1	0,94	94,00	94,00		
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR									
Indikator Kinerja Kegiatan									
2	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	0,89	89,00	89,00		
3	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0,99	99,00	99,00		
4	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	100,00	100,00		
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA						95,50	95,50		

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, diketahui **rata-rata capaian kinerja untuk seluruh output** yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di **Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2022** adalah sebesar **95,5%** dan termasuk dalam kategori **capaian kinerja Sangat Memuaskan**. Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan rata-rata realisasi kinerja yang berhasil dicapai sepanjang Tahun Anggaran 2022. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan sebagai salah satu alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2022.

Analisis tentang pencapaian kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas yang meliputi:

- Uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2022 dengan tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Tahun 2020-2024;
- Kondisi pencapaian program dan sasaran sesuai dengan kebijakan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya;
- Evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan.

Penjabaran Analisis Kinerja Organisasi terhadap hasil pengukuran Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Indikator kinerja kegiatan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

I. IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional

IKSP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:

- Kekasaran / Roughness (nilai *international roughness index*, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (*Pavement Strength*)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (*Surface Drainage and Subsoil Drainage*)

Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional merupakan Indikator yang ditetapkan sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga. Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2022:

RATING KONDISI JALAN NASIONAL	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	12,011,338
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	12,011,338
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	10,661,447
REALISASI THD AWAL (%)	88,76
REALISASI THD REVISI (%)	88,76

Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional Satker BPJN Jayapura menggunakan angka target dan capaian BPJN Jayapura Tahun 2021 sebagai berikut :

- **Target** IKSP Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional tahun 2021 : 2,89
- **Capaian** IKSP Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional untuk BPJN Jayapura : 2,76

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional terdiri dari :

1) Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan

CBR 001 : Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1	1	1	12.011.338	12.011.338	10.661.447

Manfaat :

- Penyediaan dan peningkatan layanan pada Satker BPJN Jayapura yang berkualitas dan terukur, dan/ atau;
- Mendorong peningkatan PNBPN pada Satker BPJN Jayapura.

Permasalahan:

- Survey lereng merupakan paket baru pada bulan November, sudah dilakukan survey lereng BPJN Jayapura dan saat ini dalam tahap proses pemenuhan berkas tagihan;
- Pengadaan alat laboratorium masih belum maksimal karena adanya kesalahan dalam mengambil dana pagu dalam menginput sakti;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura sudah dilakukan hanya saja belum dilakukan pencairan SPPD;
- Sebagian besar kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan merupakan Perjalanan Dinas, saat ini masih dalam proses realisasi SPPD dan pemenuhan berkas pencairan SPPD;
- Tidak ada kegiatan Akreditasi KAN di tahun 2022;

Tindak Lanjut :

- Survey lereng akan mempercepat pemenuhan berkas tagihan.
- Pada pengadaan alat laboratorium, disarankan untuk membuat SPK agar mencapai Nilai sesuai pagu.
- Untuk pencairan SPPD Monitoring dan Evaluasi akan mempercepat prosesnya.
- Akan mempercepat proses pencairan SPPD untuk Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen Birokrasi yang profesional, Tepat, Cepat, dan Akuntabel

I. IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR ditetapkan mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga. Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada rincian output yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2022 :

TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PUPR	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	27.874.391
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	27.874.391
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	26.913.812
REALISASI THD AWAL (%)	96,55
REALISASI THD REVISI (%)	96,55

Target dan Capaian Kinerja Satker BPJN Jayapura menggunakan angka target dan capaian BPJN Jayapura Tahun 2022 sebagai berikut:

- **Target** Dukungan Manajemen Kementerian PUPR : 100
- **Capaian** Dukungan Manajemen Kementerian PUPR : 100

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP 1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR terdiri dari :

1) **Layanan Umum**

EBA 962 : Layanan Umum					
• Volume (Layanan)			• Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1	1	0,89	5.541.548	5.541.548	4.911.299

Manfaat :

Penyelenggaraan kegiatan layanan umum yang meliputi Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Pengelolaan Perbendaharaan.

Permasalahan:

- Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) BPJN Jayapura, masih ada beberapa laporan yang belum terkumpul;
- Kegiatan Bantuan Hukum, Pelayanan Publik, dan Perizinan masih menunggu kelengkapan administrasi dan teknis untuk memproses permohonan izin dari pemohon;
- Kebutuhan Pencegahan Covid-19 BPJN Jayapura, masih dalam proses belanja kebutuhan Pencegahan Covid -19;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, terlambatnya proses penyiapan berkas tagihan;
- Administrasi Kegiatan BPJN Jayapura, untuk belanja barang yaitu pengadaan baju olahraga dan rompi masih dalam proses belanja dan kegiatan perjalanan dinas masih dalam proses realisasi SPPD serta pemenuhan berkas untuk pencairan SPPD;

Tindak Lanjut :

- Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) BPJN Jayapura, meminta kepada petugas e-Monitoring untuk segera menyelesaikan laporan dan mengumpulkannya;
- Kegiatan Bantuan Hukum, Pelayanan Publik, dan Perizinan, memberikan format/contoh kelengkapan administrasi dan teknis yang dibutuhkan pemohon;
- Kebutuhan Pencegahan Covid-19 BPJN Jayapura, mempercepat belanja Kebutuhan Pencegahan Covid-19 BPJN Jayapura;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, menyelesaikan berkas tagihan;
- Administrasi Kegiatan BPJN Jayapura, segera mempercepat proses belanja barang dan realisasi SPPD serta pencairan SPPD;

2) **Layanan Perkantoran**

EBA 994 : Layanan Perkantoran					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1	1	0,99	22.100.343	22.100.343	21.779.155

Cakupan Layanan Perkantoran tahun anggaran 2022 adalah :

- Pembayaran Gaji dan tunjangan;
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.

Layanan Perkantoran ini dilaksanakan secara swakelola dengan jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

Permasalahan:

Tidak dapat permasalahan yang mempengaruhi realisasi volume dan anggaran pada layanan perkantoran.

Tindak Lanjut :

-

3) Layanan Sarana Internal

EBB 951: Layanan Sarana Internal					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1	1	1,00	232.500	232.500	223.358

Manfaat :

Penyelenggaraan kegiatan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana internal serta fasilitas perkantoran dalam rangka peningkatan produktivitas kinerja pegawai

Permasalahan:

- Untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, masih sedang dalam proses pengadaan di e-katalog dan secara manual serta menunggu pengiriman barang yang telah dipesan;
- Untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran belum direalisasikan karena masih menunggu Revisi DIPA bulan November;

Tindak Lanjut :

- Untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, segera menyelesaikan proses pengadaan baik dengan e-Katalog maupun secara manual;
- Untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran segera melakukan realisasi pengadaan peralatan fasilitas perkantoran apabila Revisi DIPA sudah keluar

Melalui pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja Kegiatan (*output*) dan Sasaran (capaian sasaran *outcome*) inilah keberhasilan suatu sasaran, program, dan kebijakan organisasi dapat terlihat. Berdasarkan pembahasan capaian kinerja per output di lingkungan Satker BPJN Jayapura Tahun 2022 di atas, dapat kita simpulkan bahwa **realisasi kinerja masing-masing output berdasarkan target revisi menunjukkan angka yang Sangat Memuaskan** dengan rata-rata capaian kinerja seluruh output pada akhir Tahun Anggaran 2022 di angka **95,5%** (*Data capaian rata-rata kinerja output di Catatan Kaki LKIP Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2022*).

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Selama kurun waktu 2020 - 2021, Satker BPJN Jayapura telah memelihara, meningkatkan dan membangun jalan nasional maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional. Melihat kinerja Satker BPJN Jayapura selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa target dan sasaran yang sudah terpenuhi dan yang masih belum terpenuhi. Untuk mengetahui capaian kinerja Satker BPJN Jayapura tahun ini dengan tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Dirjen Bina Marga, dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir (2020, 2021,2022) dengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel IV.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi)
Tahun 2020 – 2022

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022		
			TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)
1	Jalan yang Terpelihara	km									
	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km	0.0001	0.0001	100.00						
2	IKP 2 : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1	1	85.24						
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Layanan									
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100.00						
	Layanan Dukungan	Layanan	1	1	99.92	1	1	89.37			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022		
			TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)
	Manajemen Satker										
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan									
	Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	98.52	1	1	99.66	1	0,99	99,00
	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen				1	1	100.00	1	0,94	94,00
	Layanan Sarana Internal	Unit				1	1	100.00	1	1	100,00
	Layanan umum	Layanan							1	0,89	89,00
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				96.74			97.26			95,5

Sumber : Data Pengukuran Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun 2020-2022

Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun – tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam PK Revisi, terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja dari 2020 ke 2022 yang dipengaruhi adanya pemotongan anggaran dalam rangka *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga terdapat penyesuaian target pada Revisi DIPA yang dilakukan di lingkungan Satker BPJN Jayapura, kemudian terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya kurang optimal dikarenakan adanya tantangan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 juga terdapat kendala dalam realisasi anggaran karena peralihan system aplikasi keuangan dari SAS (Sistem Aplikasi Satker) ke SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Dengan komitmen yang tinggi dalam menuntaskan pelaksanaan paket/kegiatan di tahun anggaran 2022 maka terjadi peningkatan capaian kinerja yang juga didukung oleh adanya optimalisasi terhadap dana sisa lelang rupiah murni yang tidak terserap.

Berikut ini merupakan data perbandingan target yang tercantum di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura untuk Tahun 2022 dengan realisasi capaian di tahun 2022, serta terdapat informasi besaran akumulasi target lima tahun yang tercantum di Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura 2020 – 2024 seperti tampak pada **Tabel IV.5** di bawah ini :

Tabel IV.5 Perbandingan Target Dokumen Perencanaan Lainnya dengan Realisasi Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun 2022

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2021		2022		CAPAIAN KUMULATIF
				TARGET RENSTRA	REALISASI	TARGET RENSTRA	REALISASI	
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km						
2	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	5	1		1		
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	5	1		1		
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	1	1	1		1
5	Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	1	1	0,99	1,99
6	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen			1		0,94	1,94
7	Layanan Sarana Internal	Unit			1		1	2,00
8	Layanan Umum	Layanan					0,89	0,89

Sumber : Data Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

4.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran secara total berdasarkan laporan e-Monitoring status 18 Januari 2023 adalah sebesar Rp 37.575.259.000,- atau 94,21% terhadap PK Awal dan Revisi tahun 2022. Data pencapaian keuangan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6 Data DIPA Awal dan Realisasi Keuangan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2022

DIPA AWAL	:	Rp. 39.885.729.000,-
DIPA AKHIR	:	Rp. 39.885.729.000,-
REALISASI KEUANGAN	:	Rp. 37.575.259.000,-
SISA	:	Rp. 2.310.470.000,-
PERSEN REALISASI	:	94,21%

Berdasarkan realisasi anggaran Satker BPJN Jayapura Tahun 2022, dibawah ini disajikan informasi realisasi anggaran masing-masing output berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 6 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
		39.885.729	39.885.729	37.575.259	94,21	94,21	
	Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
	IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional	12.011.338	12.011.338	10.661.447	88,76	88,76	
	Indikator Kinerja Kegiatan						
1	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	12.011.338	12.011.338	10.661.447	88,76	88,76	
	IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	27.874.391	27.874.391	26.913.812	96,55	96,55	
	Indikator Kinerja Kegiatan						
2	EBA 962 Layanan Umum	5.541.548	5.541.548	4.911.299	88,63	88,63	
3	EBA 994 Layanan Perkantoran	22.100.343	22.100.343	21.779.155	98,55	98,55	

4	EBB 951	Layanan Sarana Internal	232.500	232.500	223.358	96,07	96,07	
---	------------	----------------------------	---------	---------	---------	-------	-------	--

Sumber : Data Anggaran Satker BPJN Jayapura Tahun 2022

Realisasi IKP Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional menunjukkan persentase yang Sangat Memuaskan di angka 88,76%. Realisasi IKP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR menunjukkan persentase yang Sangat Memuaskan di angka 96,55%. Capaian penyerapan Satker BPJN Jayapura secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2022 persentase realisasi anggaran di angka 94,21%. Pada **Tahun Anggaran 2021 persentase realisasi anggaran** mampu mencapai angka **95,30%**. Meskipun pelaksanaan paket/kegiatan di tahun ini banyak dipengaruhi oleh kendala pandemi COVID-19 dan peralihan sistem keuangan dari SAS ke SAKTI , namun karena telah dilakukan *refocussing* kegiatan maka penyerapan anggaran bisa dioptimalkan di akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja tahun ini yang termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan tidak terlepas dari pola pengendalian, evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang efektif. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mendorong agar progress fisik dapat dipacu dan diikuti oleh progress keuangan adalah sebagai berikut :

- Penerapan pola “Deteksi Dini” atas permasalahan-permasalahan yang ada terutama terkait dengan sumber daya, manajemen dan proses administrasi;
- Pemetaan permasalahan yang dilakukan setiap bulan untuk ditetapkan siapa yang dipandang perlu dan mampu untuk mengambil tindakan turun tangan;
- Monitoring secara intensif atas rencana aksi yang telah ditetapkan dalam upaya penyelesaian suatu masalah.

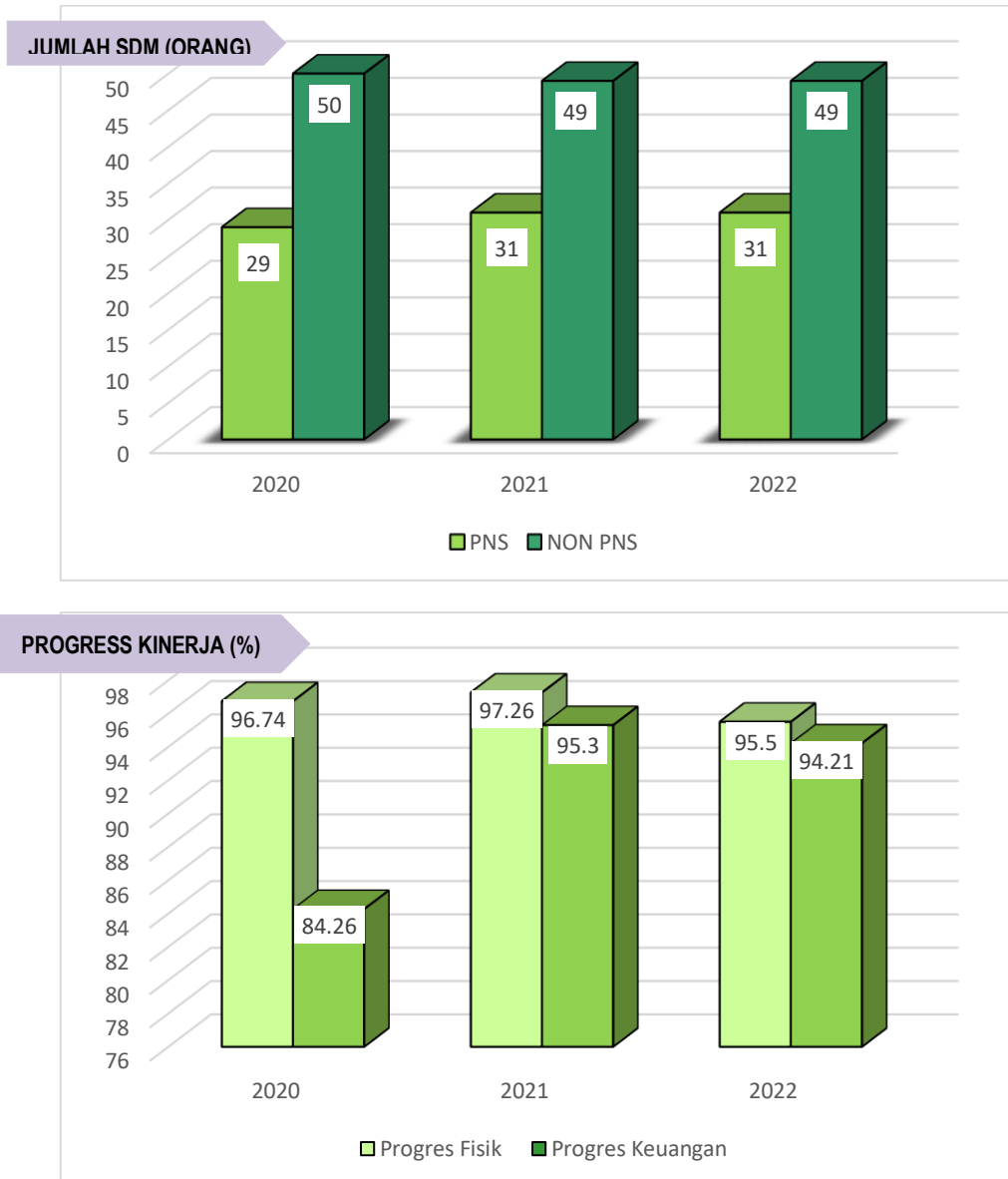
4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Satker BPJN Jayapura sebagai Unit Satuan Kerja dibawah koordinasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dituntut untuk terus meningkatkan kinerja yang selaras dengan Visi, Misi Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024. Tercapainya sasaran kemantapan Jalan Nasional serta prioritas untuk mewujudkan fungsionalnya Ruas Jalan Trans Papua dengan fokus penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan di segmen-segmen yang belum terhubung menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Satker BPJN Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Lainnya.

Oleh karena itu sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, Satker BPJN Jayapura melakukan analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun penyerapan anggaran. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Satker BPJN Jayapura langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi

masing-masing. Secara berkala dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan diwujudkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan dan tahunan.

Satker BPJN Jayapura menggunakan indikator capaian kinerja fisik dan keuangan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kemudian membandingkan dengan jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh yang diberikan antara ketersediaan sumber daya manusia dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, dengan data dan informasi sebagai berikut :



Gambar 4.2 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Progres Fisik dan Keuangan di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2020-2022

Tabel IV.7 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Satker BPJN Jayapura

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	Realisasi Anggaran	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020	79	48.490.519.000	96,74
2021	80	40.576.751.000	97,26
2022	80	37.575.259.000	95,5

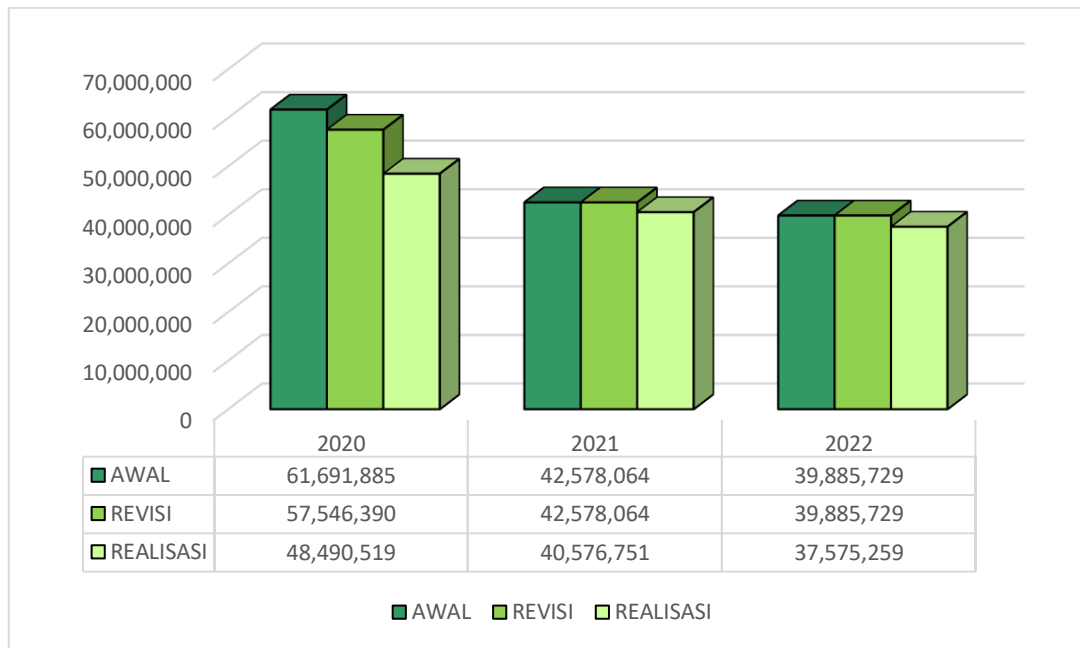
Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa di tahun 2022 secara total terjadi tidak terjadi penambahan jumlah sumber daya manusia dari tahun 2021 di lingkungan Satker BPJN Jayapura. Untuk capaian kinerja fisik mengalami penurunan 1,76% dari tahun sebelumnya, begitu juga tingkat penyerapan keuangan mengalami penurunan 1,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja fisik dan keuangan yang dicapai tahun ini dengan jumlah sumber daya yang dimiliki memberi catatan kedepannya bagi Satker BPJN Jayapura untuk bisa terus berupaya melakukan perbaikan demi peningkatan kinerja di tahun yang akan datang. Penetapan target yang umumnya selalu meningkat dari tahun ke tahun seharusnya menjadi motivasi dan masukan bahwa di kebiasaan kerja selama ini ada yang harus diperbaiki, diantaranya kedisiplinan kerja bagi pegawai, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam manajemen pengelolaan data yang aktual dan valid, cara kerja yang tidak efektif dan efisien atau penanganan masalah yang lambat, serta cara kerja fisik di lapangan yang tidak maksimal. Dari sisi peningkatan kualitas/kompetensi pegawai BPJN Jayapura, para pemangku kepentingan juga perlu menekankan tentang pentingnya komitmen, integritas, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas kerja sehari-hari, disamping itu juga memberikan perhatian dan kesempatan kepada sumber daya manusia/pegawai yang dimiliki dalam keikutsertaan pada kegiatan maupun pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai serta menunjang produktivitas dan prestasi kerja sesuai bidang kerja masing-masing, sehingga di tahun yang akan datang BPJN Jayapura dapat menyelesaikan setiap target kinerja secara optimal sesuai kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

4.3.2 Analisis Penyerapan Anggaran

Pada **Tabel IV.8** berikut disajikan rekapitulasi alokasi dan realisasi anggaran Satker BPJN Jayapura tahun 2020 – 2022 :

Tabel IV.8 Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2022 Satker BPJN Jayapura

NO	TAHUN ANGGARAN	DIPA AWAL (Rp. ribu)	DIPA REVISI (Rp. ribu)	REALISASI ANGGARAN (Rp. ribu)	SISA ANGGARAN (Rp. ribu)	% REALISASI ANGGARAN
1	2020	61,691,885	57,546,390	48,490,519	9,055,871	84.26
2	2021	42,578,064	42,578,064	40,576,751	2,001,313	95.30
3	2022	39,885,729	39,885,729	37,575,259	2,310,470	94,21



Gambar 4.3 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja maka diperoleh data alokasi dan realisasi anggaran pada Satker BPJN Jayapura Tahun 2020 s/d Tahun 2022. Dari tabel dan grafik diperoleh informasi untuk jumlah alokasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini selain disesuaikan dengan kebutuhan prioritas penanganan di lapangan, juga dipengaruhi oleh pemekaran Balai yang terjadi di tahun 2019 sehingga terbentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke, serta pada pertengahan tahun 2020 dengan terbentuknya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena sehingga ruas jalan nasional Provinsi Papua yang pada tahun 2019 seluruhnya masih ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, kini alokasi anggarannya menyesuaikan jumlah ruas yang ditangani masing-masing Balai. Berkat kinerja dan komitmen para Satker dan PPK maka pada tahun 2022 Satker BPJN Jayapura berhasil mencapai realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,21%.

Peningkatan kinerja yang masih harus menjadi perhatian adalah meliputi bagaimana peningkatan kualitas/mutu dari Sumber daya Manusia di lingkungan Satker BPJN Jayapura. Terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian di dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja. Berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 9 Point-Point Perhatian dan Tindak Lanjut

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
1	MANAJEMEN	
	Kurangnya Komunikasi dengan personil Satuan Kerja	Melakukan perbaikan dalam hal komunikasi baik melalui tatap muka langsung (rapat/koordinasi) maupun tidak langsung (pesan singkat/email/telepon)
	Penempatan posisi SDM Satker yang tepat	Menempatkan personil sesuai dengan pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja personil

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
	SOP untuk pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian	Merumuskan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan, terutama Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian
2	PERENCANAAN	
	Komitmen terhadap pencapaian kinerja	Meningkatkan prestasi capaian target
	Pengoptimalan fungsi dari Renstra dan Perjanjian Kinerja sebagai penunjuk arah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Meningkatkan pemahaman dan memberikan arahan yang benar sesuai dengan peraturan dan tujuan sasaran yang akan dicapai
	Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesuai prioritas	Meningkatkan dan mengontrol agar penggunaan anggaran dapat dialokasikan sesuai prioritas
	Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan	Melakukan gelar personil Konsultan Perencana agar diperoleh kesepahaman dalam pembuatan dokumen perencanaan
	Kurangannya pemahaman terhadap spesifikasi teknis	Melakukan pembahasan bersama mengenai spesifikasi teknis
	Kurangannya pemahaman terhadap dampak lingkungan	Mengundang narasumber untuk memberikan pengarahan mengenai lingkungan hidup dan dampak pekerjaan bidang jalan jembatan terhadap lingkungan hidup
3	PENGADAAN	
	Kurangannya personil yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan barang jasa	Aktif mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa
	Pemahaman yang berbeda terhadap Peraturan terkait pengadaan barang jasa terutama Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pembuatan dokumen pengadaan yang belum seragam mengikuti ketentuan surat edaran tentang dokumen pengadaan yang terbaru (Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan SE Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun 2021)	Melakukan diseminasi dan pembahasan-pembahasan dalam rangka memberikan update (pembaharuan) tentang peraturan pengadaan barang/jasa yang terbaru dan memberikan pemahaman yang sama terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dan pembuatan dokumen pengadaan tersebut. Beberapa peraturan dokumen pengadaan : - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpes No. 17 tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; - Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; - Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; - Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun 2021. - Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
		di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
	Banyaknya surat yang menyatakan tidak puas terhadap proses lelang	Memperbaiki proses pelelangan secara terus menerus dan aktif melakukan pembahasan yang melibatkan semua unsur (Pejabat Struktural, Satker, PPK, ULP dan Pokja)
	Pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dengan e-procurement dan penggunaan aplikasi SIPBJ (Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa) terintegrasi yang berfungsi sebagai pendokumentasian proses PBJ dari perencanaan s.d serah terima pekerjaan	- Memberikan pelatihan mengenai e-procurement - mengoptimalkan penggunaan e-procurement sebagai alat untuk melakukan pengadaan yang lebih transparan
4	PELAKSANAAN	
	Pengendalian mutu belum konsisten dengan spesifikasi	Membuat SOP mengenai SMM dan melakukan uji petik di lapangan
	Kurang intensifnya koordinasi dengan Pemda setempat	Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat secara terus-menerus
	Kemampuan Kontraktor dan Konsultan yang masih kurang	Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan di lapangan dan pelatihan terhadap staf Kontraktor dan Konsultan
5	PENGAWASAN	
	Peninjauan lapangan perlu ditingkatkan	Meningkatkan frekuensi peninjauan lapangan
	Peran Konsultan Supervisi belum optimal	Mengontrol dan mengawasi Konsultan Supervisi agar lebih berperan aktif melalui kehadiran di lapangan dan memberikan masukan
	Kemampuan teknis staf satker dalam melakukan pengawasan di lapangan belum memadai	Mengikut sertakan staf pengawas pada Satker pada kegiatan pelatihan/diklat-diklat pengawasan
6	EVALUASI	
	Sistem evaluasi kinerja belum berjalan secara optimal	Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya sistem evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

4.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2021

Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Nomor 04/KPTS/Bb18/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Tahun 2021 di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2021 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik), akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan nilai angka 75.33% dengan rincian:

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	24.43 %
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	18.66 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12.51 %
4.	Evaluasi Internal	10 %	7.02 %
5.	Capaian Kinerja	20 %	12.71 %
	Jumlah	100 %	75.33 %

Terhadap kelemahan yang masih ada direkomendasikan kepada Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
A. Perencanaan Kinerja	Untuk periode selanjutnya dokumen perencanaan satker dapat menjelaskan secara spesifik mengenai tujuan Satker BPJN Jayapura yang ingin dicapai pada akhir periode dokumen perencanaan dan relevan dengan tugas dan fungsi Satker BPJN Jayapura;
B. Pengukuran Kinerja	Capaian indikator kinerja dapat dijadikan pertimbangan pimpinan dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
C. Pelaporan Kinerja	Tim Evaluator Balai akan berkoordinasi dengan pusat mengenai rumus Efisiensi Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan besaran efisiensi yang terkuantifikasi (bukan hanya analisis

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
	mengenai perbandingan data kinerja dengan jumlah SDM tahun tersebut dan tahun sebelumnya).
D. Evaluasi Internal	Tambahkan dalam laporan mengenai narasi/ bukti dokumentasi bahwa data kinerja digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik untuk periode selanjutnya.
E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Tambahkan informasi apabila terdapat pelaksanaan kegiatan terkait inisiatif dalam pelayanan publik serta penghargaan-penghargaan yang berhasil diperoleh Satker BPJN Jayapura di tahun berjalan (bila ada).

Berdasarkan Rekomendasi yang telah diberikan beberapa kriteria sudah ditindaklanjuti oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura antara lain pemberian *punishment* dan perbaikan laporan kinerja.

BAB V PENUTUP

Secara umum, kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional sudah menunjukkan performa yang **Memuaskan** bahkan **Sangat Memuaskan** dikarenakan sebagian besar kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Satuan Kerja BPJN Jayapura **berada di atas 80%**. Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian angka kinerjanya di akhir tahun 2022 mencapai **>90 - 100** dengan kategori **Sangat Memuaskan**, yaitu:

1. Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan dengan nilai kinerja 94,00;
2. Layanan Perkantoran dengan nilai kinerja 99,00;
3. Layanan Sarana Internal dengan nilai kinerja 100,00.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian angka kinerjanya di akhir tahun 2022 mencapai **>80 – 90** yaitu Layanan Umum dengan nilai 89,00.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, sangat diharapkan kinerja yang sudah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan. Di samping itu pentingnya disiplin melakukan monitoring dan evaluasi agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat segera dicarikan solusi sehingga target tetap tercapai.

5.1 Permasalahan

Permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbatas yang bertempat tinggal menyebar. Hal ini menyebabkan beberapa daerah masih belum terjangkau fasilitas infrastruktur yang memadai khususnya di kawasan pegunungan. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka membuka keterisolasian dan peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua. Dari informasi permasalahan yang ada pada Bab IV, maka permasalahan utama yang cenderung menjadi penyebab capaian kinerja di sepanjang tahun 2022 menjadi tidak maksimal yaitu

dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan tertunda bahkan belum dapat terealisasi tahun ini. Selain itu peralihan sistem keuangan SAS ke SAKTI pada awal tahun juga menghambat proses penyerapan anggaran, serta faktor SDM dimana jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.

5.2 Rekomendasi

- a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
- b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi Zoom;
- c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki tahun 2021 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;
- d. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan *updating* progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;
- e. Proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan SAKIP dimasa mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDU M. P. SASARARI
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	98,27 %	100,00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2,89	2,89
	Rincian Output		
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran
 Rp 43.552.314.000


Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Jayapura, Januari 2022
Kepala Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura

Edu M. P. Sasarari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						43.552.314	Total Anggaran
		Rating Kondisi Jalan Nasional					13.348.793	
		CBR 001 Layanan penyalpan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen				13.348.793	
			1 Dokumen	Provinsi Papua				
			1 Dokumen	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			13.348.793	
				310 Bantuan Teknis			8.654.856	
					AJ SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	4.909.048	
					AK KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	3.745.808	
				317 Peralatan Jalan dan Jembatan			400.000	
					AA PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	KOTA JAYAPURA	400.000	
				401 Monitoring dan Evaluasi			3.232.650	
					AB MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	1.205.201	
					AC PELAKSANAAN UJI PETIK	KOTA JAYAPURA	280.344	
					AD PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	KOTA JAYAPURA	551.660	
					AE AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	KOTA JAYAPURA	70.480	
					AF KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM	KOTA JAYAPURA	710.691	
					AG UJI LAIK FUNGSI JALAN	KOTA JAYAPURA	414.274	
				413 Penyusunan Dokumen Lingkungan			1.061.287	
					AH IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) DI WILAYAH BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	669.644	
					AI PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DI PROV.PAPUA - WILAYAH BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	391.643	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						30.203.521	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					30.203.521	
		EBA 962 Layanan Umum	1 Layanan				5.641.548	
			1 Layanan	Provinsi Papua				
			1 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			5.641.548	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			501.696	
					AL PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN	KOTA JAYAPURA	238.348	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
					AM SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING) BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	23.600	
					AN PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	KOTA JAYAPURA	72.934	
					AO KEGIATAN BANTUAN HUKUM, PELAYANAN PUBLIK, DAN PERIZINAN	KOTA JAYAPURA	166.814	
				055	Pengelolaan perbendaharaan		4.799.604	
					AP KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	879.680	
					AQ JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	1.287.208	
					AR PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	KOTA JAYAPURA	374.900	
					AS ADMINISTRASI KEGIATAN BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	2.134.616	
					AT PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE	KOTA JAYAPURA	123.200	
				235	Penyusunan Laporan Keuangan BMN		340.248	
					AU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	KOTA JAYAPURA	340.248	
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1 Layanan				24.375.973	
			1 Layanan		Provinsi Papua			
			1 Layanan		Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		24.375.973	
				001	Gaji dan Tunjangan		14.010.074	
					AV PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	KOTA JAYAPURA	14.010.074	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		10.365.899	
					AW BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	KOTA JAYAPURA	2.054.895	
					AX HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	KOTA JAYAPURA	8.311.004	
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	1 Unit				186.000	
			1 Unit		Provinsi Papua			
			1 Unit		Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		186.000	
				052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		178.500	
					AY PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	KOTA JAYAPURA	178.500	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran		7.500	
					AZ PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	KOTA JAYAPURA	7.500	



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BENYAMIN ELIESER PASURNAY
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 20 Desember 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

HEDY RAHADIAN

BENYAMIN ELIESER PASURNAY

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	98.27 %	100.00 %	
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.89	2.76	
	Rincian Output			
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %	
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100.00	100.00	
	Rincian Output			
	EBA 962	Layanan Umum		1 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

	Anggaran
	Rp 12,011,338
	Rp 27,874,391
Total Anggaran	Rp 39,885,729

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Jayapura, 20 Desember 2022
Kepala Satker Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Jayapura

Benyamin Elieser Pasurnay

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							39,885,729	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						12,011,338	
		Rating Kondisi Jalan Nasional					12,011,338	
		CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen				12,011,338	
			1 Dokumen	Provinsi Papua				
			1 Dokumen	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			12,011,338	
				310	Bantuan Teknis		6,963,012	
					AJ SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	3,071,610	
					AK KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	3,638,969	
					BA SURVEY LERENG BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	252,433	
				317	Peralatan Jalan dan Jembatan		400,000	
					AA PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	KOTA JAYAPURA	400,000	
				401	Monitoring dan Evaluasi		4,648,326	
					AB MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	1,163,076	
					AC PELAKSANAAN UJI PETIK	KOTA JAYAPURA	431,726	
					AD PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	KOTA JAYAPURA	916,321	
					AE AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	KOTA JAYAPURA	47,720	
					AF KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM	KOTA JAYAPURA	2,089,483	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						27,874,391	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					27,874,391	
		EBA 962 Layanan Umum	1 Layanan				5,541,548	
			1 Layanan	Provinsi Papua				
			1 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			5,541,548	
				052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		475,711	
					AL PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN	KOTA JAYAPURA	236,548	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
					AM SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING) BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	23,600	
					AN PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	KOTA JAYAPURA	52,440	
					AO KEGIATAN BANTUAN HUKUM, PELAYANAN PUBLIK, DAN PERIZINAN	KOTA JAYAPURA	163,123	
				055 Pengelolaan perbendaharaan			4,621,773	
					AP KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	476,580	
					AQ JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	1,247,682	
					AR PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	KOTA JAYAPURA	374,900	
					AS ADMINISTRASI KEGIATAN BPJN JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	2,336,411	
					AT PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE	KOTA JAYAPURA	186,200	
				235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN			444,064	
					AU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	KOTA JAYAPURA	444,064	
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1 Layanan				22,100,343	
			1 Layanan	Provinsi Papua				
			1 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			22,100,343	
				001 Gaji dan Tunjangan			11,522,631	
					AV PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	KOTA JAYAPURA	11,522,631	
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			10,577,712	
					AW BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	KOTA JAYAPURA	2,054,895	
					AX HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	KOTA JAYAPURA	8,522,817	
		EBB 951 Layanan Sarana Internal	1 Unit				232,500	
			1 Unit	Provinsi Papua				
			1 Unit	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			232,500	
				052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			146,300	
			7 unit		AY PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	KOTA JAYAPURA	146,300	
				053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			86,200	
			7 Unit		AZ PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	KOTA JAYAPURA	86,200	

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	REALISASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI/EMON (%)	KET
(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(8)/100	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)/(12)*100	(16)=(14)/(13)*100	(18)
						39,885,729	39,885,729	37,575,259	94.21	94.21	Total Anggaran
						12,011,338	12,011,338	10,661,447	88.76	88.76	
Rating kondisi jalan nasional						12,011,338	12,011,338	10,661,447	88.76	88.76	
CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengerukan	6	6	5.77			12,011,338	12,011,338	10,661,447	88.76	88.76	
	1	1	0.94	Provinsi Papua		12,011,338	12,011,338	10,661,447	88.76	88.76	
	1	1	0.94	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		12,011,338	12,011,338	10,661,447	88.76	88.76	
				310 Bantuan Teknis		6,963,012	6,963,012	6,899,366	99.09	99.09	
			-		AJ SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	3,071,610	3,071,610	3,071,610.00	100.00	100.00	
			-		AK KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	3,638,969	3,638,969	3,596,123.00	98.82	98.82	
			-		BA SURVEY LERENG BPJN JAYAPURA	252,433	252,433	231,633.00	91.76	91.76	
				317 Peralatan Jalan dan Jembatan		400,000	400,000	399,993	100.00	100.00	
			-		AA PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	400,000	400,000	399,993.00	100.00	100.00	
				401 Monitoring dan Evaluasi		4,648,326	4,648,326	3,362,088	72.33	72.33	
			-		AB MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	1,163,076	1,163,076	731,607.00	62.90	62.90	
			-		AC PELAKSANAAN UJI PETIK	431,726	431,726	301,408.00	69.81	69.81	
			-		AD PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	916,321	916,321	726,849.00	79.32	79.32	
			-		AE AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	47,720	47,720	39,384.00	82.53	82.53	
			-		AF KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM	2,089,483	2,089,483	1,562,840.00	74.80	74.80	
						27,874,391	27,874,391	26,913,812	96.55	96.55	
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						27,874,391	27,874,391	26,913,812	96.55	96.55	
EBA 962 Layanan Umum	11	11	10.88			5,541,548	5,541,548	4,911,299	88.63	88.63	
	1	1	0.89	Provinsi Papua		5,541,548	5,541,548	4,911,299	88.63	88.63	
	1	1	0.89	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		5,541,548	5,541,548	4,911,299	88.63	88.63	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		475,711	475,711	337,914	71.03	71.03	
			-		AL PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN	236,548	236,548	158,071.00	66.82	66.82	
			-		AM SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING) BPJN JAYAPURA	23,600	23,600	19,600.00	83.05	83.05	
			-		AN PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	52,440	52,440	46,665.00	88.99	88.99	
			-		AO KEGIATAN BANTUAN HUKUM, PELAYANAN PUBLIK, DAN PERIZINAN	163,123	163,123	113,578.00	69.63	69.63	
				055 Pengelolaan pembendaharaan		4,621,773	4,621,773	4,141,721	89.61	89.61	

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	REALISASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI/EMON (%)	KET
(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(8)/100	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)/(12)*100	(16)=(14)/(13)*100	(18)
			-		AP KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	476,580	476,580	461,331.00	96.80	96.80	
			-		AQ JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA	1,247,682	1,247,682	1,247,681.00	100.00	100.00	
			-		AR PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	374,900	374,900	250,527.00	66.83	66.83	
			-		AS ADMINISTRASI KEGIATAN BPJN JAYAPURA	2,336,411	2,336,411	2,006,289.00	85.87	85.87	
			-		AT PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE	186,200	186,200	175,893.00	94.46	94.46	
				235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN		444,064	444,064	431,664	97.21	97.21	
			-		AU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	444,064	444,064	431,664.00	97.21	97.21	
EBA 994 Layanan Perkantoran	6	6	5.99			22,100,343	22,100,343	21,779,155	98.55	98.55	
	1	1	0.99	Provinsi Papua		22,100,343	22,100,343	21,779,155	98.55	98.55	
	1	1	0.99	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		22,100,343	22,100,343	21,779,155	98.55	98.55	
				001	Gaji dan Tunjangan	11,522,631	11,522,631	11,409,321	99.02	99.02	
			-		AV PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	11,522,631	11,522,631	11,409,321.00	99.02	99.02	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	10,577,712	10,577,712	10,369,834	98.03	98.03	
			-		AW BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	2,054,895	2,054,895	1,855,357.00	90.29	90.29	
			-		AX HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	8,522,817	8,522,817	8,514,477.00	99.90	99.90	
EBB 951 Layanan Sarana Internal	34	34	34			232,500	232,500	223,358	96.07	96.07	
	1	1	1.00	Provinsi Papua		232,500	232,500	223,358	96.07	96.07	
	1	1	1.00	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		232,500	232,500	223,358	96.07	96.07	
				052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	146,300	146,300	50,000	34.18	34.18	
			-		AY PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	146,300	146,300	50,000	34.18	34.18	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran	86,200	86,200	173,358	201.11	201.11	
			-		AZ PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	86,200	86,200	173,358	201.11	201.11	

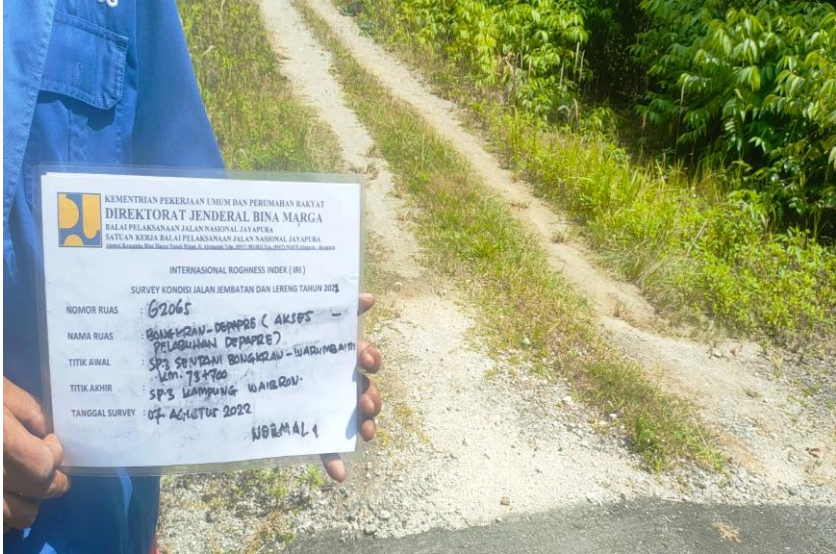
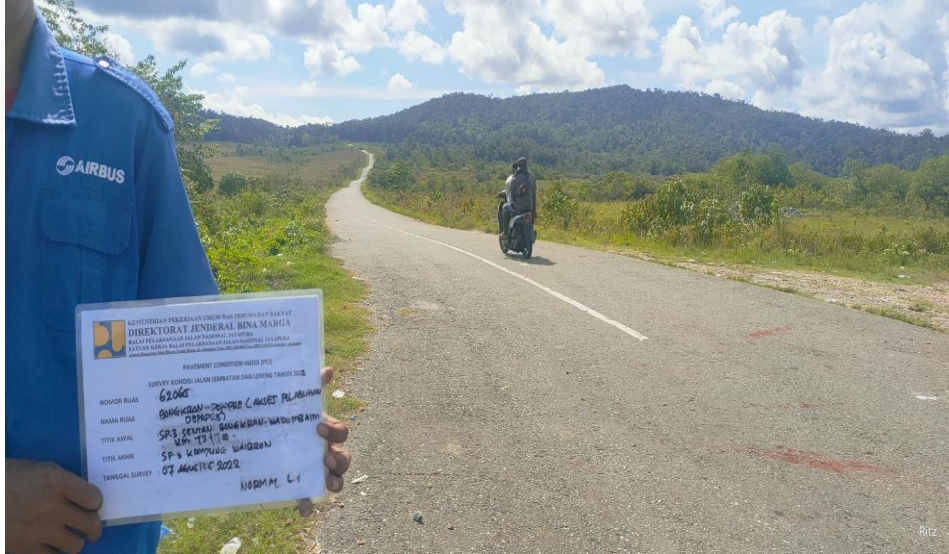
LAMPIRAN DOKUMENTASI

**SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL JAYAPURA**

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2022

1



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

<p>SASARAN PROGRAM</p>	<p>FOTO</p>	
<p>Meningkatkannya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</p>	<p>Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Survey Kondisi Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura</p>	
<p>PAKET <i>Survey Kondisi Jalan Internasional Roghness Index (IRI)</i></p>	 <p>The image shows a person in a blue uniform holding a survey form. The form is titled 'INTERNASIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI)' and contains the following information: SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2022, NOMOR RUAS: 62065, NAMA RUAS: BANGKAWAN - DEWAPPE (AKSES PELAGIANAN DEWAPPE), TITIK AWAL: SP-3 SUNDAN BONGKAWAN - WABERON KM. 78+700, TITIK AKHIR: SP-3 KAMPUNG WABERON, TANGGAL SURVEY: 07 AGUSTUS 2022, and NORMAL 1.</p>	 <p>The image shows a person in a blue uniform holding a survey form. The form is titled 'PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)' and contains the following information: SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2022, NOMOR RUAS: 62065, NAMA RUAS: BANGKAWAN - DEWAPPE (AKSES PELAGIANAN DEWAPPE), TITIK AWAL: SP-3 SUNDAN BONGKAWAN - WABERON KM. 78+700, TITIK AKHIR: SP-3 KAMPUNG WABERON, TANGGAL SURVEY: 07 AGUSTUS 2022, and NORMAL 1.</p>

2

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Survey Kondisi Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura	
PAKET Survey Kondisi Jalan (Drainase)		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Survey Lereng BPJN Jayapura	
PAKET Survey Kondisi Lereng BPJN Jayapura		

4

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN



**SASARAN
PROGRAM****FOTO**

Meningkatnya
Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis
Lainnya

Output :
**Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura**

**PAKET
Preservasi Jalan Yetti-
Senggi- Mamberamo II**



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura	
PAKET (Kegiatan) Jembatan Aery I		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura	
PAKET (KEGIATAN) Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Pelaksanaan Uji Petik	
PAKET (KEGIATAN) Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire-Wanggar-Kwatisore)		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program	
PAKET (KEGIATAN) Validasi Nilai Kondisi Jembatan		

9

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

**SASARAN
PROGRAM****FOTO**

Meningkatnya
Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis
Lainnya

Output :

Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program

PAKET (KEGIATAN):
Penyusunan Perjanjian
Kinerja (PK Revisi) TA.
2022 dan Draft LKIP
UPT TA. 2022 di
Lingkungan Ditjen Bina
Marga



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura	
PAKET (KEGIATAN) Inspeksi Kelaikan <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP) Tahap II di Kab. Biak Numfor		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Pendampingan Teknis Preservasi Jalan	
PAKET (KEGIATAN) Workshop Katalog elektronik		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p>Output :</p> <p>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan</p>	
PAKET (KEGIATAN) Penajaman Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan BPJN Jayapura		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Survey Kondisi Jalan dan Jembatan BPJN Jayapura	
PAKET (KEGIATAN) Kalibrasi Alat Roughmeter III dan Irimeter III		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Output : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	
PAKET (KEGIATAN) Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2023 di Lingkungan Ditjen Bina Marga		

**SASARAN
PROGRAM****FOTO**

Meningkatnya
Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis
Lainnya

Output :
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program

PAKET (KEGIATAN)
Validasi Hasil Survey
Kondisi Jalan dan
Jembatan Semester II

